

Dukungan UNMISSET Terhadap Administrasi Sipil

Dengan berakhirnya pendudukan Indonesia di Timor Leste tahun 1999, administrasi pemerintahan pun menghilang. Selain dari penghapusan resmi administrasi provinsi Indonesia, kampanye kekerasan dan kekacauan oleh TNI/milisi menghancurkan sebagian besar fasilitas umum. Lebih dari itu, kira-kira 7.000 pegawai negeri sipil keluar atau melarikan diri dari Timor Leste dan menciptakan suatu kekurangan kritis akan sumber daya manusia untuk membangun kembali sistem administrasi dan pelayanan sipil.

Pada saat PBB, Indonesia dan Portugis menyetujui referendum, mereka juga setuju bahwa PBB akan bertanggungjawab dalam memerintah Timor Leste untuk periode transisi jika rakyat Timor Leste menolak dilanjutkannya pemerintahan Indonesia. Untuk ini, Dewan Keamanan PBB membentuk *United Nations Administration in East Timor (UNTAET)* untuk memerintah negara ini selama dua setengah tahun. Rakyat Timor Leste dan PBB berharap bahwa UNTAET akan menyiapkan rakyat Timor Leste untuk memerintah negaranya sendiri setelah periode ini berakhir.

Namun, harapan ini tidak dapat direalisasikan sepenuhnya. Walaupun Dewan Keamanan PBB memberikan kekuasaan penuh pada kepala UNTAET Sergio Vieira de Mello, misinya tidak banyak melibatkan partisipasi masyarakat TL dalam proses transisi. Seperti Xanana Gusmao baru-baru ini mengatakan, "Masyarakat Timor Leste sering dianggap orang yang akan menerima hadiah, bukan orang yang memiliki negara yang harus dibangun dengan tangannya sendiri." Kekuasaan yang diberikan pada Sergio De Mello dan UNTAET dari New York tidak hanya "gagal untuk mendesentralisasikan bentuk otoritas absolutisnya", seperti kata salah satu mantan anggota UNTAET senior, dia "tidak memasukkan masyarakat lokal di dalam ruang lingkupnya."

UNTAET dapat dibilang berhasil dalam menangani situasi

darurat kemanusiaan yang diciptakan oleh "September Hitam 1999", dan dalam memfasilitasi Pemilihan Dewan Konstituante dan proses pemilihan presiden, serta pembuatan Konstitusi Timor Leste. Namun, karena masalah sosial dan politik yang sangat besar yang masih harus diperhatikan, ada banyak tugas penting untuk pemerintahan terpilih yang dipimpin Perdana Menteri Mari Alkatiri. Usaha untuk mendesentralisasikan kekuasaan diterapkan terlalu perlahan dan tidak memadai, sebagian karena warisan struktur kekuasaan tersentralisasi yang diterapkan UNTAET. Usaha untuk menerapkan program pendidikan kewarganegaraan belum berfokus pada interaksi masyarakat dengan pemerintah secara memadai (lihat *Buletin La'o Hamutuk*, Vol.3, No.4, Mei 2002). Untuk menghadapi masalah-masalah ini, niat politik sangat diperlukan selain dukungan struktur administrasi yang kuat.

Sangat jelas bahwa berbagai masalah akan tetap ada saat Timor Leste mencapai kemerdekaan penuh pada bulan Mei 2002, walaupun misi UNTAET akan berakhir. Setelah melalui banyak diskusi, Dewan Keamanan PBB membentuk UNMISSET –United Nations Mission of Support in East Timor (lihat *Buletin La'o Hamutuk*, Vol.4, No.2, Mei 2003), dengan mandat selama satu tahun yang kemudian diperpanjang sebanyak dua kali, sampai bulan Mei 2005.

Resolusi Dewan Keamanan nomor 1410 memberikan mandat kepada UNMISSET sebagai berikut:

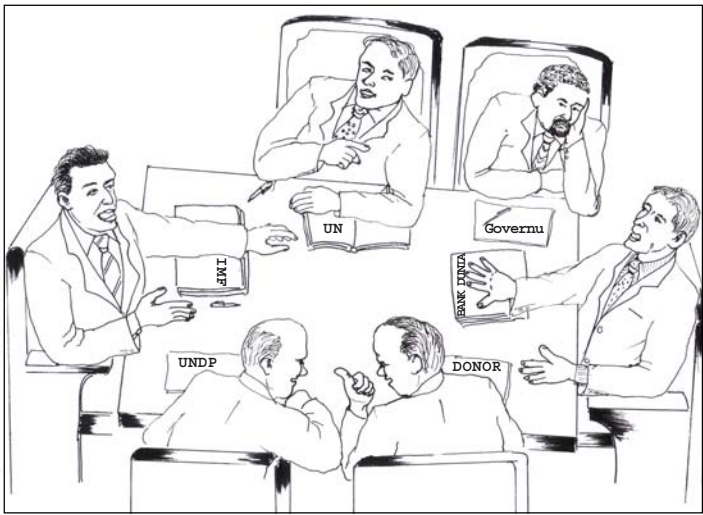
✓ Mendukung Pembangunan Administrasi administrasi publik dengan menempatkan penasihat pada posisi yang kritis, untuk memastikan kelangsungan dan kestabilan politik

(bersambung ke hal 2)



Daftar Isi . . .

Berita Singkat	7
Komunitas Negara-negara Berbahasa Portugis	8
Editorial: Memutihkan Wolfowitz	11
COE: Kurangnya Niat Politik Akan Menghalangi Keadilan Bagi Timor Leste	13
Editorial: Komisi Kebenaran dan Persahabatan Tidak Akan Menghasilkan Keduanya	16



- ✓ Mendukung penegakkan hukum serta membantu pembentukan kepolisian nasional Timor Leste (PNTL), dan
- ✓ mendukung menjaga keamanan eksternal dan internal Timor Leste.

Selama kurang lebih tiga tahun, UNMISSET bekerja menerapkan mandatnya. Artikel ini adalah laporan yang ditulis oleh *La'o Hamutuk* mengenai dukungan terhadap Administrasi Public di bawah UNMISSET.

Beberapa pertanyaan menyangkut masalah ini adalah: apa alasan utama Dewan Keamanan PBB menganggap sektor ini sebagai salah satu prioritas misinya pasca-UNTAET? Dari mana dananya? Bagaimana mereka menerapkan mandatnya ini? Apa saja hasil dari penerapan tersebut?

Melalui beragam wawancara yang dilaksanakan tahun ini dengan beragam pihak seperti SRSG Sukehiro Hasegawa, mantan juru bicara UNMISSET Marcia Poole, staff internasional yang direkrut sebagai penasehat atau mentor di bermacam kantor kementerian. Kami juga banyak membaca banyak dokumen. Artikel ini adalah untuk menganalisa kinerja UNMISSET dalam hal dukungan terhadap administrasi public, dan kontribusi masyarakat sipil. Kontribusi masyarakat internasional melalui Penasehat Internasional bukanlah tidak penting, hanya fokus kami adalah melihat bagaimana UMISSET menerapkan mandatnya dalam hubungannya dengan administrasi publik dan hasil dari penerapan ini.

Tinjauan Mengenai Administrasi Sipil di Timor Leste

Sistem administrasi sipil di bawah UNTAET memiliki banyak masalah. Proses *Timorisasi*, kebijakan yang secara sadar diikuti UNTAET untuk membangun kapasitas populer dan transfer kekuasaan, adalah salah satu contohnya. Walaupun Dewan Konsultatif Nasional (National Consultative Council – NCC, atau pada saat itu National Council – NC) dibentuk untuk memberikan kesan proses transfer kekuasaan, pada dasarnya badan ini hanyalah sebuah tempat berdebat sementara kekuasaan penuh masih berada pada Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal (Special Representative of The Secretary General – SRSG). Semua partisipasi populer pada masa UNTAET tidak dicerminkan oleh NCC atau NC, karena anggota-anggotanya tidak melalui pemilihan. Kesempatan yang hilang ini bukan hanya mencuri kesempatan masyarakat Timor Leste untuk mempraktekkan pengambilan keputusan pada waktu transisi, tapi juga menciptakan atmosfir ketidakpercayaan dan ketidakberdayaan – kasarnya suatu pendudukan – yang mempersulit pembangunan

administrasi sipil masyarakat Timor Leste yang profesional.

Sebagai akibatnya, rakyat Timor Leste tidak siap untuk menjalankan negaranya sendiri pasca UNTAET, dan dukungan masyarakat internasional yang konstruktif dalam bentuk PBB masih sangat dibutuhkan.

Melihat hal ini, UNDP (United Nations Development Program) menjalankan “audit keahlian” yang pada bulan Oktober 2001 mengidentifikasi lebih dari 300 pos penasehat internasional untuk beragam departemen dan unit di dalam institusi negara – dengan 100 posisi diklasifikasikan sebagai pos “stabilitas” dan 228 sebagai pos “pembangunan”. Ini adalah bagian penting dari panduan dasar misi pasca UNTAET.

Sesuai dengan mandat UNTAET, laporan Sekretaris Jenderal kepada Dewan Keamanan tahun 2002 merekomendasikan suatu mandat baru untuk mendukung administrasi publik. Laporan ini meletakkan posisi “stabilitas” sebagai posisi “kritis” untuk menjalankan fungsi kunci negara dan penyediaan pelayanan pemerintahan dasar, dan mengusulkan agar negara-negara anggota PBB mendanai posisi-posisi ini melalui sumbangan ke UNMISSET. Laporan ini menyebutkan posisi “pembangunan” sebagai posisi penting untuk kebutuhan jangka panjang dalam memperbaiki kapasitas institusi negara dan memastikan pembangunan berkelanjutan. Bukannya didanai oleh sumbangan, laporan ini merekomendasikan agar negara donor secara sukarela mendukung posisi ini dengan menyediakan dana untuk UNDP atau langsung kepada pemerintah Timor Leste.

Melalui Resolusi DK PBB no 1410, UNMISSET memiliki tiga mandat utama, salah satunya adalah membantu struktur administrasi sipil. Ia menjalankan mandat ini dengan merekrut dan mengontrak penasehat “stabilitas”. Sementara itu, UNDP mengelola dana yang disediakan oleh donor untuk merekrut, mengkontrak, dan mendukung 228 penasehat “pembangunan”. Institusi negara membantu merencanakan posisi-posisi ini dan memainkan peran kolaborasi pada proses rekrut dan pengangkatan. Kedua hal ini, tujuan utama adalah untuk mentransfer keahlian dan pengalaman penasehat-penasehat ini ke pegawai negeri sipil Timor Leste, dan memenuhi kebutuhan jangka pendek dan kebutuhan jangka panjang dari perangkat negara dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

Misi UNMISSET berakhir pada bulan Mei 2005, dan berubah menjadi misi yang lebih kecil dan sempit (UNOTIL – United Nations Office in Timor Leste), yang kemudian menghasilkan penasehat internasional yang lebih sedikit. Berdasarkan prioritas yang diidentifikasi oleh institusi negara, jumlah penasehat Stabilitas Politik dikurangi dari 100 menjadi 58, dan Penasehat Pembangunan dikurangi dari 228 menjadi 114 (kemudian ditambah lagi menjadi 118). Keputusan ini dibuat setelah UNDP, UNMISSET, dan Unit Koordinasi untuk Pengembangan Kapasitas (*Capacity Development Coordination Unit – CDCU*) pemerintah Timor Leste membuat kelompok kerja bersama untuk berkonsultasi dengan badan-badan yang bersangkutan.

Penempatan Penasehat

Audit keahlian tahun 2001 mengidentifikasi empat area kritis di institusi negara yang perlu bantuan dari staff internasional: pelayanan keuangan, sistem internal bermacam kementerian, pelayanan dasar seperti sanitasi dan air bersih, listrik, pembangunan jalan, perumahan, dan kesehatan; dan sistem hukum/pengadilan.

Kementerian pemerintah dan sekretaris negara mendapat

bantuan terbesar, diikuti oleh sistem pengadilan, parlemen, dan kantor kepresidenan. Dari semua departemen pemerintah, Kementerian Perencanaan dan Keuangan mendapat jumlah penasehat terbanyak. Tabel dibawah menunjukkan berapa banyak posisi penasehat yang diidentifikasi – tidak semua dari mereka diisi, dan beberapa di antaranya diisi setelah kekosongan yang panjang karena proses pendanaan dan rekrut.

Table 1: Distribusi posisi kritis dan paling kritis dalam institusi negara

2002-2004

Jenis institusi	Posisi Stabilitas (UNMISSET)	Posisi pembangunan (UNDP dan lainnya)
Menteri Perencanaan dan Keuangan ..	33	59
Menteri Komunikasi, Transpor, etc.	15	30
Administrasi negara	11	19
Menteri Keadilan	6	9
Dewan Kementerian	2	16
Menteri Pertanian	1	13
Menteri Pendidikan	2	11
Menteri Kesehatan	1	9
Menteria Lingkungan Hidup	0	9
Kementerian dan Sekretariat Lainnya ...	7	22
Perangkat Hukum*	6	1
Parlemen	1	2
Kantor Kepresidenan	0	8
Lain-lain	0	15
TOTAL	100**	228**

2004-2005

Jenis institusi	Posisi Paling Kritis (UNMISSET)	Posisi Kritis (UNDP dan lainnya)
Menteri dan Sekretaris Negara	39	97
Perangkat Hukum*	13	2
Parlemen	2	5
Kantor Kepresidenan	2	5
Lain-lain	2	9
TOTAL	58	118

* Hakim dan jaksa internasional dan lain-lain yang bekerja di Unit Pelanggaran Berat dan Panel Khusus bukan penasehat dan tidak dimasukkan.

** Jumlah total kelihatan tidak betul karena informasi ini adalah gabungan dua tabel dalam dokumen UNDP yang memang tidak konsisten.

Pendanaan

Seperti dibahas di atas, ada dua sumber dana yang digunakan untuk mendukung posisi penasehat administrasi publik di Timor Leste. Pendanaan untuk Penasehat Stabilitas UNMISSET berasal dari anggaran Operasi Perdamaian untuk Kelompok Dukungan Sipil (Civilian Support Group – CSG), yang juga meliputi operasi militer PKF. \$485 juta digunakan dalam dua tahun pertama UNMISSET (lihat *Buletin La’o Hamutuk*, Vol.4, No.2). Dari \$85 juta untuk tahun ketiga UNMISSET, \$17 juta digunakan untuk mendanai personil militer dan kepolisian, \$36 juta untuk personil sipil (kombinasi penasehat internasional, ‘sukarelawan’ PBB, dan staff nasional), dan \$31 juta untuk biaya operasional.

Dari anggaran personil sipil, \$7.339.800 digunakan untuk mendanai 58 penasehat “paling kritis” UNMISSET selama 2004-2005. Bila seluruh posisi diisi untuk satu tahun penuh,

biaya rata-rata untuk setiap penasehat “paling kritis” dengan demikian adalah \$126.548.

Dalam hal pendanaan Penasehat Pembangunan (Posisi Kritis pada 2004-2005), dananya berasal dari donor bilateral dan multilateral. UNDP mendanai 55 penasehat selama 2004-2005, dengan biaya \$4.746.775, dengan biaya rata-rata penasehat “kritis” UNDP \$86.305. Beberapa posisi tidak diisi atau diisi terlambat.

Posisi pembangunan/kritis lainnya didanai secara bilateral oleh donor tanpa melibatkan UNDP (lihat tabel).

Donor Bilateral untuk penasehat yang dikelola UNDP

Donor	Kontribusi (US\$)
Australia	435.000
Canada	708.000
Denmark	135.000
European Commission	3.000.000
Finland	544.000
Ireland	2.037.000
New Zealand	1.207.000
Norway	1.301.000
Sweden	3.133.000
UK	135.000
USA	395.000
UNDP	206.000
Total	13.236.000

Selain menyediakan dana melalui UNDP, negara-negara donor mengangkat dan menunjuk orang-orang ke berbagai pos secara bilateral. Dengan kata lain, negara donor ini tidak menyediakan dana melalui UNDP. Dalam pembicaraan dengan beberapa staff UNDP, proses bantuan bilateral ini disebut sebagai “supply driven”. Dijelaskan juga bahwa ini berarti perwakilan negara-negara tersebut mendekati pemerintah dengan proyek-proyek yang ingin mereka dani secara langsung. Ini menunjukkan bahwa banyak penasehat yang didanai secara bilateral tidak semerta-merta ditempatkan sesuai dengan prioritas pemerintah.

Partner Pembangunan Bilateral	Positions Supported
AusAID (Australia)	11
JICA (Jepang)	3
Pemerintah Portugal	14
USAID (USA)	5
UNMISSET	2
Lain-lain	4
Total	39

Sumber: www.undp.east-timor.org, diakses 1 Agustus 2005

Penerapan Dukungan Administrasi Sipil

Ada beberapa langkah proses implementasi ini. Pertama, ada suatu pengkajian yang melibatkan pihak berkepentingan (*stakeholders*), dalam hal ini pemerintah Timor Leste, badan-badan PBB, dan institusi keuangan internasional. Pengkajian ini menentukan kebutuhan situasional di lapangan, yang menjadi fondasi pembuatan mekanisme untuk pembangunan kapasitas, dan mencoba untuk mengerti kapasitas tenaga lokal. Setelah itu para stakeholder mencari dana dengan mendekati negara-negara donor potensial. Setelah dana didapat, mereka mencari dan mengangkat penasehat. Lalu mereka memulai proses pembangunan kapasitas. Akhirnya, mereka merancang dan melaksanakan strategi transisi dan

jalan keluar.

Ada tiga pilar utama pembangunan kapasitas: keahlian dan pengetahuan, yang menekankan kemampuan perorangan; sistem dan proses, yang menekankan organisasi dan prosedur di dalam dan di antara unit berbeda; dan sikap serta perilaku, yang berhubungan dengan tingkah laku perorangan ini di dalam suatu institusi. Dalam rangka memfasilitasi realisasi “pilar-pilar” ini, para penasehat melaksanakan pelatihan, membantu merancang dan menerapkan struktur kebijakan dan hukum, dan membuat manual dan petunjuk operasional.

Beberapa kemajuan yang dicapai termasuk pengadaan perangkat hukum organik untuk institusi nasional, seperti PNTL, militer, dan banyak kementerian. Ada juga kebijakan yang diterapkan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor pengelolaan bencana alam.

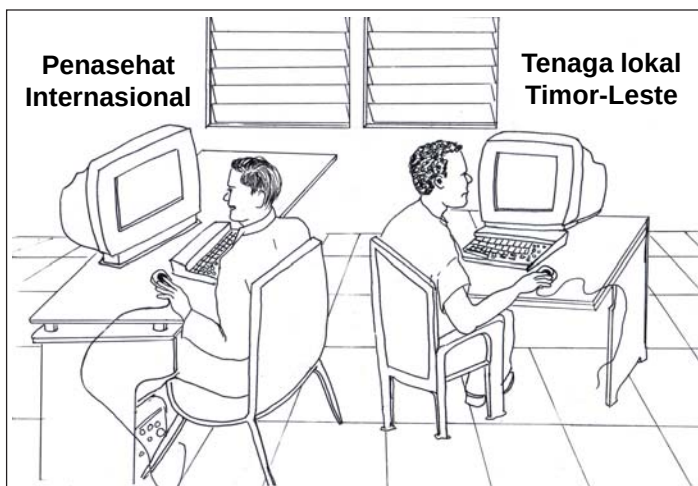
Analisa

La’o Hamutuk mengidentifikasi tujuh masalah utama dari dukungan internasional untuk pembangunan kapasitas:

- 1) pengambilan keputusan;
- 2) waktu yang terbatas untuk pembangunan kapasitas;
- 3) ketegangan antara pembangunan kapasitas institusi dan perorangan;
- 4) halangan bahasa, budaya, dan pengalaman antara penasehat internasional dan staff lokal;
- 5) tidak memadainya koordinasi antara UNMISSET dan UNDP;
- 6) penasehat internasional tidak melaksanakan kerjanya dengan baik;
- 7) terbengkalainya banyak institusi negara (yang independen dari pemerintah).

Pengambilan Keputusan

Sejak awal ada masalah serius pada waktu “audit keahlian” bulan Oktober 2001, yang diadakan pada saat belum ada pemerintah Timor Leste; kekuasaan efektif berada di tangan UNTAET. Walaupun ada orang Timor Leste yang terlibat dalam audit ini, peran mereka hanya kecil saja dibandingkan



dengan institusi dan staff internasional. Oleh sebab itu, proses penyeleksi kebutuhan dan penasehat yang spesifik – dan karenanya bentuk kapasitas dan pandangan dunia terhadap staff dan institusi negara Timor Leste – berpandangan berat sebelah untuk pihak internasional.

Peran serta pemerintah perlahan bertambah dalam hal mengidentifikasi prioritas pembangun kapasitas dalam hubungannya dengan UNMISSET dan UNDP. Ini ada dalam Unit Koordinasi untuk pengembangan Kapasitas (*Capacity*

Development Coordination Unit – CDCU) pemerintah Timor Leste. Tapi pemerintah Timor Leste berpartisipasi dalam pengkajian kebutuhan pembangunan kapasitas (untuk periode setelah bulan Juni 2004) bersama dengan UNMISSET dan UNDP hanya dimulai pada bulan Juli dan Agustus 2003. Untuk dua tahun sebelumnya, pelaku internasional mengidentifikasi posisi-posisi ini dan pemerintah Timor Leste hanya memberikan persetujuannya, dengan keputusan terakhir mengenai pendanaan (untuk posisi-posisi dari UNMISSET) dibuat oleh Dewan Keamanan PBB. Sementara untuk posisi pembangunan yang dikelola UNDP, mereka bergantung pada dukungan dan sumbangan sukarela dari para negara donor.

Waktu

Waktu perekrutan semestinya satu sampai dua bulan, tapi sering memakan waktu lebih lama untuk mencari penasehat yang qualified. Sebagian besar para penasehat mendapat kontrak tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun dengan kemungkinan perpanjangan. Melihat bahwa seorang penasehat biasanya memiliki pengalaman sedikit atau malah tidak ada dalam hal kondisi sosial dan politik Timor Leste, dia akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk beradaptasi. Para penasehat juga memerlukan waktu untuk mempelajari kemampuan tenaga lokal, struktur institusional dan politis yang terkait, faktor kebudayaan, selain hubungan perorangan dengan institusi-institusi mereka. Untuk mencapai hal ini memerlukan proses lama. Dalam hal ini, jangka kerja penasehat satu atau dua tahun tidak akan cukup untuk mencapai hasil yang diinginkan, khususnya jika diingat bahwa tugas penasehat adalah untuk membantu pembangunan kapasitas tidak hanya perorangan tapi juga institusional. Selain itu, beberapa penasehat pergi sebelum berakhirnya kontrak mereka, menciptakan kelambatan baru dalam proses pencarian penasehat baru.

Pembangunan Kapasitas Perorangan vs. Institusional

Untuk dua tahun pertama, para penasehat menggunakan pendekatan satu demi satu, memusatkan pada perorangan pada tiga level tertinggi (level 5, 6, dan 7 – level 7 adalah level menteri) mekanisme institusi negara Timor Leste. Pendekatan ini terbukti memiliki kekurangan yang besar. Pertama, selalu ada kemungkinan bahwa orang yang kapasitasnya sudah atau sedang dibangun akan pindah. Lebih jauh lagi, pendekatan ini menciptakan suatu sentralisasi keahlian, dan menciptakan suatu ketergantungan institusi pada beberapa orang tertentu saja. Jika demikian, kerja sama penasehat ini hanya akan mengkonsentrasikan keahlian itu pada sejumlah kecil saja orang-orang di tingkat tertinggi, dan akan memiliki dampak yang terbatas untuk kapasitas institusi secara keseluruhan.

Karena demikian, suatu pendekatan baru diterapkan pada bulan Juni 2004, yang meletakkan pembangunan kapasitas di tempat yang penting. Setiap penasehat sekarang mengkaji sejumlah orang-orang di tingkat yang berbeda dan pada keseluruhan institusi. UNDP dan UNOTIL akan terus melanjutkan pendekatan ini sampai bulan Mei/Juni 2006.

Komunikasi

Masalah komunikasi, disebabkan perbedaan bahasa para penasehat dan orang-orang yang dibimbing, adalah sangat pelik. Ini adalah suatu masalah yang dikeluhkan banyak sekali penasehat.

Di UNDP, 74% dari para penasehat saat ini berbicara Portugis atau Tetun, tapi mayoritas kelompok ini berbicara Portugis, bahasa yang hanya sedikit saja orang Timor Leste menguasai. Hanya 49% penasehat UNDP berbicara bahasa Indonesia atau Tetun. Ini berarti setengah dari penasehat tidak berbicara bahasa yang dimengerti sebagian besar orang Timor Leste.

Sebagian penasehat tidak memiliki pengalaman training, yang kemudian mempersulit proses transfer keahlian mereka kepada staff Timor Leste.

Berhubungan dengan masalah-masalah di atas adalah masalah pengertian budaya. Melihat bahwa kemampuan berbahasa sangat berhubungan dengan pengertian antar budaya, maka banyaknya penasehat yang tidak bisa berkomunikasi dengan pihak yang dibimbing dalam dua bahasa utama, Tetun dan bahasa Indonesia, akan berdampak serius pada proses transfer keahlian.

Untuk alasan ini, sangat baiklah apabila para penasehat adalah orang yang mengerti mengenai dan/atau orang yang pernah tinggal di Timor Leste. Tidak hanya ini akan memudahkan komunikasi mereka, tapi juga akan memperpendek waktu adaptasi dan pelajaran para penasehat.

Koordinasi

Dalam hal koordinasi, UNMISSET dan UNDP berada pada satu sisi, sementara pemerintah Timor Leste berada di sisi yang lain. Suatu kebingungan sering terjadi karena ada tumpang tindih fungsi UNMISSET dan UNDP, suatu keadaan yang di laporan UNDP tahun 2004 disebut “pertumbuhan penyatuan antara mandat Misi Perdamaian dan UNDP.”

Sewaktu masa stabilisasi (kira-kira pertengahan 2002 sampai 2003), laporan ini mengidentifikasi masalah koordinasi antara UNDP dan UNMISSET. Untuk memperbaiki situasi ini, tim program UNDP pindah ke kompleks UNMISSET pada bulan Juni 2004, untuk bisa bekerja sama lebih dekat dengan Kelompok Dukungan Sipil UNMISSET (sekarang UNOTIL). Pekerjaan ini diadakan melalui suatu kantor bersama yang disebut Unit Pengembangan Kapasitas Institusional (*Institutional Capacity Development Unit – ICDU*). Sebagai hasilnya, sekarang ada sentralisasi lebih besar dalam pengambilan kebijakan dalam hubungannya dengan pembangunan kapasitas institusional. Juga ada rencana untuk memperdalam sentralisasi ini dengan berbagi kantor dengan Unit Koordinasi untuk pengembangan Kapasitas (CDCU) pemerintah Timor Leste. Selain itu, UNMISSET, UNDP dan CDCU pemerintah menciptakan suatu sistem evaluasi dan pengawasan untuk penasehat internasional – sistem yang juga diharapkan untuk turut mengawasi penasehat bilateral.

Tugas Khusus vs. Pembangunan Kapasitas

Para penasehat diharapkan untuk mentransfer keahlian mereka pada tenaga lokal, tidak untuk menjalankan “fungsi linear” – tugas khusus yang berhubungan dengan institusi tempat mereka bekerja. Walaupun resminya para penasehat tidak mengerjakan fungsi linear, beberapa penasehat internasional mengakui bahwa mereka menjalankan tugas programatis dan manajemen, bukannya memenuhi tugas pembangunan kapasitas mereka. Beberapa penasehat mengeluhkan apa yang mereka pandang sebagai tingkat keahlian staff lokal yang rendah. Walaupun benar bahwa banyak orang Timor Leste yang dipekerjakan untuk posisi tertentu tidak memiliki pengalaman atau keahlian yang diperlukan, ini membuktikan bahwa

pembangunan kapasitas sangat penting untuk di masa datang.

Pandangan seperti itu mungkin mendorong suatu kebiasaan *sebagian* penasehat untuk melakukan tugas yang spesifik, bukannya membangun kapasitas, karena mereka menganggap staff lokal memiliki kapasitas atau potensi yang terlalu rendah untuk dapat dibantu sepenuhnya. Penasehat yang memiliki pandangan lebih baik terhadap tenaga lokal dari Timor Leste melihat terciptanya suatu lingkungan kerja yang positif yang memfasilitasi staff lokal untuk menjalankan tugas mereka, sebagai satu hal yang penting yang harus dilakukan seorang penasehat.

Tertinggalnya Institusi Negara Yang Independen Dari Pemerintah

Mayoritas dari posisi penasehat semua dikirim ke kementerian pemerintah. Sebelum saat ini, institusi seperti Parlemen Nasional mendapat perhatian yang amat sangat kecil. Sebagai contohnya, pada tahun 2002 sampai 2004, Parlemen hanya mendapat tiga dari 338 posisi penasehat internasional, yang menyebabkan banyak anggotanya mengeluh. Situasi ini sudah membaik pada jangka waktu 2004 sampai 2005. Pada tahun itu, 30 persen dari 58 penasehat stabilitas (yang sekarang disebut penasehat “paling kritis”) membantu institusi negara independen, seperti institusi hukum. Dalam hal penasehat pembangunan (yang sekarang disebut penasehat “kritis”), 20 persen ditempatkan pada unit non-pemerintah. Selain itu, UNDP memiliki proyek pendukung terpisah untuk Parlemen dan perangkat hukum Timor Leste. Banyak lagi tenaga pelatih dan penasehat internasional yang bekerja sama dengan polisi, militer, sekolah, sistem pelayanan kesehatan dan pelayanan umum lainnya, tapi ini semua di luar ruang lingkup artikel ini.

Kesimpulan dan Rekomendasi Akhir

Dukungan masyarakat internasional untuk sektor administrasi publik adalah sangat penting dan memiliki banyak hasil yang positif. Pada saat bersamaan, hasil positif dari pembangunan kapasitas amat tidak merata. Beberapa departemen yang mendapat jumlah dukungan yang besar masih mengalami masalah yang berat.

Kementerian Perencanaan dan Keuangan, misalnya, mendapat jumlah penasehat terbanyak dari instansi lainnya. Tetapi, keluhan dari masyarakat menunjukkan bahwa kedua direktorat dengan masalah terbanyak – dalam hal apa yang dipandang sebagai masalah korupsi dan transparansi – dan direktorat yang dianggap paling tidak efisien adalah Direktorat Bea dan Cukai, dan sektor proses tender. Kementerian Pendidikan juga mengalami masalah yang sama karena ketidakmampuannya dalam menerapkan anggarannya secara penuh. Diperkirakan bahwa pada tahun 2004 – 2005, hampir 60 persen dari anggaran itu tidak dieksekusi. Untuk alasan ini, kementerian ini akan selalu membutuhkan bantuan pembangunan kapasitas – lebih dari akhir mandat UNOTIL pada tanggal 20 Mei 2006.

Selain dari tantangan-tantangan ini, ada beberapa masalah yang besar dalam usaha pembangunan kapasitas yang sejauh ini menghalangi prospek jangka panjang institusi negara Timor Leste.

✓ Pemerintah Timor Leste dan rakyat negara ini – melalui perwakilan terpilih mereka – harus memiliki suara yang lebih besar dalam hal pengidentifikasian prioritas dalam hal penasehat internasional. Parlemen harus menerima

lebih banyak dukungan. Tanpa hal ini, Parlemen tidak akan memenuhi potensinya sebagai badan demokrasi yang dinamis, dan ruang lingkup hukum yang diusahakan untuk dibangun oleh Parlemen yang menjadi pondasi masyarakat akan kesusahan.

- ✓ Jika penasihat internasional dibayar lebih rendah dari gaji tinggi yang selama ini mereka terima, jumlah surplus ini digunakan lebih baik. Tantangan yang dihadapi pemerintah akan lebih mudah ditangani dengan mempekerjakan lebih banyak penasihat dengan pengalaman pelatihan tenaga lokal yang lebih baik.
- ✓ Para penasihat semestinya dapat diberi “waktu untuk belajar” untuk mengkaji kebutuhan khusus dari tenaga lokal, dan sistem internal organisasi tempat mereka bekerja. Pelajaran bahasa yang intensif sebelum dimulainya kontrak kerja para penasihat dapat mendukung perbaikan komunikasi antara penasihat dan tenaga lokal.
- ✓ Pembangunan kembali administrasi publik di bawah UNTAET adalah suatu keharusan untuk menjamin berfungsi

sinya negara baru Timor Leste ini. Namun UNTAET beroperasi dengan struktur kekuasaan yang sangat tersentralisasi yang memperlambat dibawahnya masyarakat Timor Leste ke dalam prosesnya, perlu waktu dua tahun untuk menyadari bahwa kata “Transition” (transisi) adalah kata yang paling penting di dalam nama UNTAET. Setelah transisi ke UNMISSET, warisan sentralisasi ini semestinya bisa dirubah lebih dini lagi jika ada koordinasi yang lebih besar dan lebih tanggap antara UNMISSET, UNDP, dan pemerintah. Adanya konsultan yang digaji sangat besar, yang banyak di antaranya memiliki efektifitas kecil saja dalam membangun keahlian tenaga dari Timor Leste, membuat pertanyaan mengenai apakah para penasihat ini diberikan waktu persiapan yang cukup; apakah, dalam konteks ini, proses seleksi penasihat adalah proses yang didorong donor/ketersediaan; apakah penasihat yang tepat dengan keahlian yang tepat dipilih untuk pekerjaan mereka. Terakhir, pentingnya distribusi setara para penasihat ini di seluruh institusi pemerintah dan non-pemerintah haruslah ditekankan berulang kali. ❖

Action Aid: Memperbaiki Kinerja Bantuan

Laporan bulan Mei 2005 yang dibuat Action Aid, suatu NGO yang berpusat di Inggris, membantu memberikan beberapa konteks yang berharga dalam menganalisa kekuatan dan kelemahan dukungan internasional dalam pembangunan kapasitas di Timor Leste.

Menurut laporan “Real Aid: Agenda for Making Aid Work”, pengalaman masa lampau menunjukkan bahwa bantuan bilateral (antar pemerintah) – jika dilaksanakan secara efektif sebagai bagian dari suatu strategi pembangunan yang lebih luas – dapat memberikan bantuan yang sangat besar dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat yang berpendapatan rendah. Laporan ini sangat mendorong negara-negara berpendapatan tinggi untuk menyediakan bantuan bilateral yang lebih besar, tetapi dengan kualitas yang lebih tinggi dari apa yang rata-rata dilakukan pada saat ini.

Bantuan internasional yang berkualitas lebih tinggi, menurut Action Aid, berarti negara-negara donor harus memusatkan mayoritas dana mereka dalam masalah pengurangan kemiskinan – terutama di negara-negara berpendapatan paling rendah di dunia. Saat ini, mayoritas bantuan negara Barat untuk apa yang disebut negara-negara membangun adalah yang disebut dalam laporan ini sebagai “bantuan gelap” (phantom aid) – bantuan yang sebenarnya tidak tersedia untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam kasus Amerika dan Perancis, Action Aid memperkirakan bahwa 90% bantuan luar negeri mereka adalah berkategori “gelap”. Walaupun laporan ini berfokus pada pengentasan kemiskinan – and temuannya dalam hal ini juga bisa dilihat dalam proyek yang sama di Timor Leste – di dalamnya termasuk juga pandangan yang sangat berguna dalam hal penasihat internasional yang relevan dalam masalah penasihat-penasihat internasional dan pembangunan kapasitas di Timor Leste.

Untuk beranjak dari “bantuan gelap” ke “bantuan nyata” membutuhkan, antara lain, bahwa para donor “melepaskan ikatan” bantuan mereka: artinya, penerima bantuan sebaiknya tidak diharuskan untuk menggunakan bantuan tersebut untuk membeli barang dan jasa dari negara pemberi bantuan. Sebagai tambahan, laporan ini meminta para donor untuk menghapus persyaratan pengawasan dan pelaporan yang berlebihan, menciptakan pertanggungjawaban dua-arah (antara donor dan penerima, keduanya harus transparan dan bertanggungjawab antara mereka), dan memberikan bantuan yang dijanjikan tepat pada waktunya.

Yang terutama relevan dengan masalah pembangunan kapasitas adalah analisa laporan ini mengenai bantuan teknis dan yang disebutkan sebagai “penghamburan dana untuk bantuan teknis dari konsultan internasional yang terlalu amat sangat mahal”. Bantuan teknis di seluruh dunia mencapai US\$18 milyar pada tahun 2003, paling tidak 25% dari total bantuan bilateral. Bantuan seperti demikian biasanya mendanai konsultan yang membantu pemerintah penerima bantuan dan melaksanakan pembangunan kapasitas.

Menurut Action Aid, bantuan teknis seringkali tidak memberi hasil positif karena tiga alasan utama. Pertama, para donor biasanya bersikeras bahwa para konsultan diambil dari negara donor, jadi para konsultan jarang berasal dari negara membangun.

Kedua, para konsultan menerima gaji yang sangat eksekutif. Di Kamboja, umpamanya, negara donor menghabiskan antara \$50 sampai \$70 juta pada tahun 2002 untuk membayar 700 tenaga konsultan internasional, suatu jumlah yang kira-kira sama dengan gaji setahun 160,000 pegawai negeri Kamboja. Di Vietnam, menurut seorang pejabat badan bantuan resmi Inggris (DFID), negara Inggris biasanya membayar konsultannya di Vietnam \$18,000 sampai \$27,000 per bulan, dan membayar konsultan lokal di Vietnam antara \$1500 sampai \$3000. Pengalaman di Timor Leste, tempat misi-misi PBB menggaji staff internasionalnya rata-rata 30 kali lebih tinggi dari gaji staff lokal, konsisten dengan contoh-contoh di atas.

Ketiga, bantuan teknis biasanya tidak menurut kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal, tetapi adalah manifestasi agenda para donor. Demikian, biasanya para donorlah yang menyeleksi dan mengkontrak para konsultan. Selain itu, sering terjadi koordinasi yang tidak memadai antara para donor sehingga banyak terjadi duplikat dan, karena itu, pemborosan.

Action Aid memperkirakan sekurangnya 75% bantuan teknis sebagai “bantuan gelap”. Untuk memperbaiki hal ini, Action Aid meminta para donor untuk memperbolehkan pemerintah penerima bantuan untuk mengendalikan dan mengelola proses seleksi dan pengangkatan para konsultan, untuk merekrut tenaga ahli lokal (dalam kasus Timor Leste, ini bisa meliputi orang-orang Timor Leste yang ada di negara lain) sebagai konsultan, atau orang-orang dari daerah regional tempat negara penerima bantuan berada.

Berita Singkat

Globalisasikan Keadilan – Bukan Perang dan Kemiskinan

Tiga aktifis Timor Leste – Tomas Freitas dari *La'ó Hamutuk*, Avelino Coelho dari Partai Sosialis Timor, dan Julino Ximenes dari Asosiasi Hak – turut serta dalam Kongres Solidaritas Internasional Asia-Pasifik kedua pada akhir Maret lalu di Sydney. Kongres ini, diorganisir oleh *Green Left Weekly* dan Aksi Solidaritas Asia Pasifik (Action in Solidarity with Asia and the Pacific – ASAP) dihadiri ratusan peserta dan meliputi presentasi dari individual dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, India, Filipina, Australia, dan Amerika Serikat. Berbagai isu dibahas dalam kongres yang dihadiri ratusan orang ini, termasuk isu mengenai bencana Tsunami di Asia, gerakan anti perang, internasionalisme dan lingkungan, hak asasi wanita, aktifisme budaya, pembangunan kembali gerakan sosialis kiri, imperialisme Australia, dan solidaritas dunia ketiga.

Satu dari pertemuan publik mengajukan Stan Goff, mantan tentara Operasi Khusus Amerika Serikat, yang sekarang adalah pejuang utama anti perang Irak dan penulis mengenai kebijakan luar negeri Washington. Goff berbicara mengenai pentingnya aktifis berlatar belakang militer untuk mengorganisir diri untuk gerakan anti perang, dalam rangka merangkul prajurit-prajurit yang tidak mencurigai veteran seperti yang lainnya. Yang dibutuhkan tidak hanya gerakan anti perang, kata Goff, tapi suatu gerakan “anti-imperialisme” yang dapat menantang program Washington untuk mendominasi dunia.

Tomas Freitas berbicara mengenai masalah yang dibuat pemerintah transisi PBB dan bagaimana pemerintah Timor Leste sekarang menghadapinya. Dia juga berbicara mengenai perjuangan untuk mengadakan mahkamah internasional untuk Timor Leste dan konflik politik antara Australia dan Timor Leste mengenai batas wilayah lautnya.

Kongres Inisiatif Transparansi Industri Galian

Diadakan di gedung Queen Mary II di London, Inggris, pada tanggal 17 Maret 2005, kongres ini adalah inisiatif pemerintah Inggris untuk membahas isu transparansi dan hasil minyak. Kongres ini dihadiri banyak partisipan dari industri minyak, pemerintah, masyarakat sipil dan juga institusi keuangan internasional. Sebagai delegasi masyarakat sipil *La'ó Hamutuk* diundang ke acara ini dan paper kami (bisa dilihat di www.etan.org/lh/misc/PetFundSub/05LHtoEITI-UK.htm) diusulkan dimasukkan ke dalam record kongres ini. *La'ó Hamutuk* sudah meminta Menteri Negara Urusan Pariwisata, Lingkungan, dan Investasi Timor Leste, Jose Teixeira, untuk memfollow-up hasil dari pertemuan ini, dan juga meminta hal yang sama dari Duta Besar Inggris untuk Timor Leste, Tina Redshaw. Mr. Teixeira dan Ms. Redshaw keduanya mendukung usulan ini. Follow-up ini akan berfokus hanya pada isu Timor Leste. Menurut deklarasi Woodside Company waktu kongres ini di London, Woodside juga berjanji untuk memfollow-up pertemuan ini untuk menjamin transparansi dari pihak perusahaan-perusahaan minyak internasional yang terlibat dalam eksploitasi minyak dan gas di Laut Timor. Dalam paper *La'ó Hamutuk* dalam kongres ini, *La'ó Hamutuk* mendukung persetujuan syarat minimum agar perusahaan-perusahaan menerangkan berapa yang mereka bayar kepada pemerintah, dan pemerintah juga harus menerangkan berapa yang mereka terima dari perusahaan minyak. Kami juga menunjukkan perbedaan antara apa yang dinyatakan pemerintah di London dan apa yang sebenarnya disyaratkan dalam Undang-undang Perminyakan Timor Leste. *La'ó Hamutuk* akan tetap bekerja untuk menjamin agar janji-janji pemerintah Timor Leste dan perusahaan minyak internasional di atas dapat terealisasi. ❖

La'ó Hamutuk sudah meng-update CD-ROM OilWeb kami dengan informasi penting yang terbaru

Referensi berharga ini meliputi informasi mengenai sumber daya minyak Timor Leste, sejarah eksplorasi dan pembangunan di sini, data dokumenter dan legal yang mendetail (termasuk sebuah film) mengenai perdebatan batas maritim Australia-Timor Leste, serta latar belakang konsekuensi pembangunan minyak dan gas di seluruh dunia. Tambahan terbaru meliputi teks dan komentar mengenai Undang-Undang Perminyakan dan Undang-Undang Dana Perminyakan Timor Leste, serta banyak lagi latar belakang global dan lokal mengenai transparansi, “kutukan sumber daya”, dan informasi penting lainnya.

Semua analisa historis dan politis, materi audiovisual, dll, masih ada dalam edisi baru ini, yang memiliki lebih dari 2000 file. Sebagian besar dalam bahasa Inggris, tetapi ada juga dalam bahasa Indonesia dan bahasa Tetun.

Ratusan kopi sudah didistribusikan ke seluruh dunia. CD OilWeb ini tersedia di kantor kami dan beberapa distributor internasional: harganya \$2 untuk perorangan, dan \$50 untuk institusi.

Bulletin La'ó Hamutuk berikutnya akan meliputi artikel mengenai undang-undang perminyakan Timor Leste, dan bagaimana undang-undang tersebut gagal untuk mencegah masalah besar dan serius yang sering datang dari pembangunan minyak dan gas. Untuk melihatnya, lihat www.etan.org/lh/misc/PetRegSub/04submission.html

Siapa di La'ó Hamutuk?

Staf La'ó Hamutuk: Maria Afonso de Jesus, Alex Grainger, Yasinta Lujina, Inês Martins, Guteriano Nicolau,

Penerjemah: Nino Sari, Selma Hayati

Dewan Penasehat: Joseph Nevins, Nuno Rodrigues, Pamela Sexton, Aderito de Jesus Soares

Gambar: Cipriano Daus

Pekerja sukarela: Kay Fisher, Cassia Bechara, Charlie Scheiner

Komunitas Negara-negara Berbahasa Portugis (CPLP)

Pada tanggal 20 Mei 2002, pada waktu kemerdekaan Timor Leste dipulihkan, negara baru ini menjadi anggota resmi Komunitas Negara Berbahasa Portugis (Community of Portuguese Speaking Countries – CPLP), bergabung dengan Angola, Brazil, Cape Verde, Guinea Bissau, Mozambique, Portugal, dan Sao Tome dan Principe. Walaupun Timor Leste sudah diundang sebagai pengamat pada pertemuan-pertemuan CPLP sejak tahun 1998, negara ini baru menjadi anggota penuh setelah kemerdekaannya, dan setelah konstitusi mengumumkan Portugis sebagai salah satu bahasa resminya.



Komunitas ini memandang dirinya sebagai “proyek politik baru, yang dasar utamanya adalah bahasa Portugis, kaitan sejarah, dan warisan sama kedelapan anggotanya – yang adalah tempat-tempat yang terpisah secara geografis, tetapi memiliki bahasa yang sama.” Walaupun sebenarnya bahasa Portugis digunakan mayoritas penduduk hanya di Portugal, Brazil, dan Angola.

Dalam hal kaitan sejarah, anggota-anggota “negara dunia ketiga” semua diduduki dan kemudian dijajah oleh Portugal selama ratusan tahun, yang tentunya membawa pengaruh-pengaruh yang sama kepada mereka. Terutama dengan anggota-anggota dari Afrika, Timor Leste memiliki hubungan yang dekat karena sejarah penjajahan di bawah kolonialisme Portugis dan gerakan kemerdekaan yang sama. Dalam perjuangan kemerdekaan dari Portugal di tahun 70an, banyak pemimpin nasionalis Timor Leste mendapatkan dukungan dan inspirasi dari gerakan kemerdekaan di negara-negara seperti Angola, Mozambique, dan Guinea Bissau. Negara-negara ini adalah juga negara-negara pertama yang mengakui kemerdekaan Timor Leste, yang diproklamlirkan pada tanggal 28 November 1975. Maka benarliah bahwa CPLP sejak berdirinya selalu secara resmi mendukung perjuangan Timor Leste membebaskan diri dari penjajahan Indonesia.

Tetapi sekarang, lebih dari 30 tahun kemudian, apa arti Timor Leste menjadi anggota negara-negara berbahasa Portugis? Selain dari kaitan sejarah dukungan untuk Timor leste dari beberapa negara CPLP, apa yang bisa disumbangkan CPLP untuk Timor Leste yang merdeka dan berdaulat?

Apa itu CPLP?

Komunitas Negara Berbahasa Portugis (CPLP) didirikan pada tanggal 17 Juli 1996, kebetulan persis 20 tahun setelah Republik Indonesia secara resmi menyatakan aneksasi Timor Leste sebagai propinsi ke 27 (Hari Integrasi – 17 Juli 1976). CPLP mewakili, pada efeknya, suatu penggabungan bekas negara jajahan Portugis.

Tidak seperti komunitas Inggris dan Perancis (Negara-negara Commonwealth dan Komunitas Franco-

phone), yang lebih mementingkan “kerja sama” ekonomi dan “pembangunan”, komunitas Portugis memiliki elemen pembudayaan bahasa Portugis dan “lusophony” (lihat keterangan di bawah) yang kuat. Promosi bahasa Portugis jelas disebut sebagai satu dari tiga tujuan utama komunitas ini. Menurut undang-undangnya, semua negara dapat menjadi anggota komunitas selama ia menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa resminya.

Sejak pendiriannya, CPLP dipandu oleh prinsip-prinsip di bawah ini:

- ✓ Persamaan hak di antara negara-negara anggota;
- ✓ Non-intervensi dalam masalah internal setiap negara-negara anggota;
- ✓ Saling menghormati jati diri setiap negara-negara anggota;
- ✓ Perlakuan timbal-balik
- ✓ Keunggulan dalam hal perdamaian, demokrasi, perangkat hukum, hak asasi manusia, dan keadilan sosial;
- ✓ Saling menghormati integritas teritorial negara-negara anggota;
- ✓ Promosi pembangunan;
- ✓ Promosi kerja sama yang saling menguntungkan.

Struktur CPLP

CPLP terdiri dari tiga badan pembuat keputusan dan satu badan eksekutif. Keputusan di ketiga badan pembuat keputusan dibuat secara konsensus.

Kongres Kepala Negara dan Pemerintahan: bertemu setiap dua tahun atau setiap saat dibutuhkan oleh dua pertiga dari anggota. Badan ini terdiri dari badan pemerintah tertinggi di setiap negara-negara anggota, dan adalah badan pembuat keputusan yang tertinggi. Pertemuan berikutnya untuk badan ini akan dilaksanakan di Guinea Bissau pada tahun 2006.

Dewan Menteri-Menteri: terdiri dari menteri-menteri luar negeri dari setiap negara anggota. Dewan ini bertemu setiap tahun atau setiap dibutuhkan oleh minimal dua pertiga anggota. Dewan ini bertanggungjawab pada Kongres Kepala Negara dan Pemerintahan.

Komite Tetap: terdiri dari satu perwakilan dari setiap negara anggota. Badan ini bertemu setiap bulan di kantor pusat CPLP di Lisbon. Badan ini dikoordinasi oleh perwakilan negara yang sedang menjabat sebagai presiden Dewan Menteri-Menteri.

Sekretariat Eksekutif: Ini adalah badan eksekutif CPLP. Badan ini menerapkan keputusan-keputusan yang dibuat di setiap badan pembuat keputusan di atas. Sekretariat ini dikepalai oleh Sekretaris Eksekutif, yang adalah orang penting dari salah satu negara anggota, untuk menjalankan mandat selama dua tahun.

Selain empat badan di atas, CPLP juga memiliki **Titik Utama Kerja Sama** (Focal Point of Cooperation), yang mengkoordinasikan kegiatan kerja sama di lingkungan komunitas



ini dan membantu badan-badan CPLP lainnya dalam hal pekerjaan; dan **Pertemuan Menteri-Menteri Tematis** (Thematic Ministerial Meetings), yang terdiri dari menteri-menteri dan sekretaris negara dari negara-negara anggota dengan tujuan mengkoordinasikan kegiatan kerja sama di bidangnya masing-masing.

Presiden Eksekutif CPLP adalah Fradique de Menezes, dari Sao Tome dan Principe, dan Sekretaris Eksekutifnya adalah Luis Fonseca dari Cape Verde, keduanya dipilih dalam Kongres Kelima Kepala-Kepala Negara di Sao Tome pada bulan Juli 2004.

Anggaran

Anggaran badan Sekretariat Eksekutif terdiri dari iuran wajib tahunan yang dibayar oleh setiap anggota, ditambah dengan sumbangan sukarela. Komite Konsultasi bertanggung jawab untuk menyiapkan anggaran, yang kemudian harus disetujui oleh Dewan Menteri-Menteri.

Tetapi sebenarnya, CPLP adalah komunitas yang hampir bangkrut. Banyak anggota-anggotanya yang belum membayar iuran tahunan mereka, dan biasanya hanya Brazil dan Portugal yang bisa menyumbang secara sukarela. Meskipun begitu, dua negara ini lebih mementingkan proyek bilateral mereka daripada investasi di komunitas ini.

Sewaktu diwawancara Lusa pada bulan Juni 2004, Sekretaris Eksekutif pada saat itu, Mr. Zeferino Martins, melaporkan bahwa Portugal, Brazil, Angola, dan Mozambique biasanya membayar iuran tahunan mereka. Guinea Bissau jarang membayar, dan Sao Tome dan Principe serta Cabo Verde, jika mereka membayar, biasanya terlambat. Timor Leste sendiri mengatakan pada pertemuan terakhir Dewan Menteri-Menteri CPLP bahwa negaranya mungkin tidak akan bisa membayar iuran anggotanya untuk beberapa tahun ke depan.

Tetapi menurut Manuel Brito Semedo, direktur Institut Internasional Bahasa Portugis CPLP, pada tahun 2002 dan 2003 hanya setengah anggota membayar iuran tahunan mereka, dan pada tahun 2004 hanya dua yang membayar.

Anggaran yang disetujui untuk tahun 2004 adalah 1.082.704 euro. Anggaran tersebut didanai iuran anggota tahunan sebesar 30.000 euro setiap anggota dan dengan sumbangan sukarela yang berjumlah 847.704 euro. (lihat tabel di bawah)

Sumbangan Sukarela – Fiscal Year 2004 (Euros)

Angola	103.211
Brazil	309.427
Mozambique	36.174
Portugal	393.892

* Source: www.cplp.org, Resolution on the Approved Budget for the Executive Secretariat for the year 2005

Untuk suatu komunitas internasional dengan delapan anggota dan tujuan yang ambisius, ini adalah anggaran yang sangat sederhana. Karena seperti kita tahu bahwa banyak anggota yang tidak membayar iuran anggotanya, anggaran yang sebenarnya semestinya lebih rendah lagi.

Ada juga suatu “Dana Umum” yang dibatasi untuk membiayai proyek-proyek kerja sama di dalam komunitas ini. Dana ini sangat kecil – juga karena kurangnya sumbangan dari negara-negara anggota – dan banyak proyek-proyek yang

sudah disetujui yang tidak pernah lebih dari sekedar proyek di atas kertas.

Apa pekerjaan CPLP?

Semua kegiatan dan tindakan CPLP berasal dari tiga tujuan utamanya: persetujuan politik-diplomatik; kerja sama sosial, budaya, dan ekonomi; dan promosi dan penyebaran bahasa Portugis dan budaya lusophone.

1. Koordinasi Politik-Diplomatik:

Seperti halnya sebagian besar komunitas regional atau pasca-kolonial, salah satu tujuan utama CPLP adalah untuk mendirikan suatu kelompok yang bersatu untuk menjaga kepentingan bersama dari negara-negara anggotanya, khususnya dalam lingkup organisasi multilateral seperti PBB dan badan-badannya, yang kemudian memperkuat kehadiran anggotanya itu di dunia internasional.

Salah satu contoh persatuan suara ini adalah dukungan CPLP untuk keinginan Brazil mendapatkan kursi tetap di Dewan Keamanan PBB. Ini sesuai dengan kepentingan Brazil sendiri, tetapi juga sebenarnya sesuai dengan kepentingan seluruh anggota CPLP, yang berharap mendapatkan sekutu yang kuat di Dewan Keamanan. Pada waktu Lao Hamutuk mewawancarai Menteri Pertahanan Timor Leste, Mr. Roque Rodrigues, dia menekankan pentingnya Timor Leste memiliki “teman baik” demikian di dalam Dewan Keamanan.

Sejak pendiriannya, CPLP menjunjung perjuangan Timor Leste sebagai satu dari tujuan utama usaha diplomatiknya. Pada setiap pertemuan Dewan Menteri-Menteri CPLP, selalu ada pernyataan yang memperkuat dukungannya untuk kemerdekaan Timor Leste. Motto “Bebaskan Xanana, bebaskan Timor Leste” selalu dibawa semua anggota CPLP di setiap forum internasional tempat mereka berpartisipasi.

Namun, “suara bersama” ini tidak selalu sama. Seperti dinyatakan dokumen CPLP, koordinasi diplomatik ini bertujuan melindungi “kepentingan dan kebutuhan bersama” negara-negara anggotanya. Pada waktu kebutuhan dan kepentingan tersebut tidak sama, maka CPLP kehilangan suara bersamanya. Ini terjadi lagi waktu penyerangan Iraq oleh Amerika dan sekutunya. CPLP tidak bisa mendapatkan konsensus dan menyuarakan pernyataan sikap. Sementara Brazil, Cape Verde, Sao Tome, dan Mozambique secara keras menolak penyerangan ini, Portugal dan Angola terangterangan mendukungnya. Timor Leste bersikap netral dalam hal ini, walaupun Menteri Luar Negeri Jose Ramos Horta menyatakan dukungannya terhadap “misi perdamaian” dalam tanda kutip yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Pemerintah Timor Leste kemudian menyatakan bahwa pendapat Menteri Horta tidak mewakili posisi Timor Leste sebagai negara.

Sebagian besar tindakan politik-diplomatik yang diadakan CPLP menyangkut dengan anggota-anggotanya. Dalam beberapa tahun terakhir, CPLP mengirimkan misi-misi untuk menengahi krisis di Sao Tome dan Principe dan Guinea Bissau, serta misi-misi pengamat pemilihan umum ke Mozambique (2003) dan Guinea Bissau (2004).

Anggota CPLP terbanyak adalah negara-negara berpendapatan rendah dengan politik yang lemah, dengan kekuatan kecil saja untuk beraksi di arena internasional – mungkin dengan perkecualian Brazil dan Portugal. Oleh sebab itu, keefektifan usaha-usaha diplomatik CPLP untuk membela kepentingan anggota-anggotanya yang miskin di hadapan negara-negara kaya yang kuat sangatlah diragukan.

2. Kerja Sama Sosial dan Ekonomi

Kerja sama internasional yang efektif tentunya bergantung kepada dana, yang CPLP sendiri kekurangan.

Selain proyek-proyek yang dibangun dan didanai dalam komunitas sendiri, CPLP juga mengatur kegiatan institusi publik dan swasta dengan tujuan meningkatkan kerja sama antara negara-negara anggota dengan institusi mereka, seperti Badan Pembangunan Brazil (Brazilian Agency for Cooperation – ABC) dan Institut Bantuan Untuk Pembangunan Portugal (Portuguese Institute for Aid to Development – IPAD). Kerja sama proyek-proyek CPLP didanai tidak hanya dari pemberian pemerintah negara anggota, tapi juga dari dana yang tersedia melalui kerja sama dengan badan-badan multilateral, LSM, perusahaan dan badan swasta lain yang berkepentingan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara berbahasa Portugis.

Anggaran yang disetujui untuk proyek kerja sama pada Pertemuan Titik Utama (Meeting of the Focal Points) kesepuluh pada Februari tahun ini adalah 640.000 Euro. Menurut Sekretaris Eksekutif CPLP, Luis Fonseca, Dana Khusus dari organisasi akan menanggung 500.000 dari jumlah tersebut.

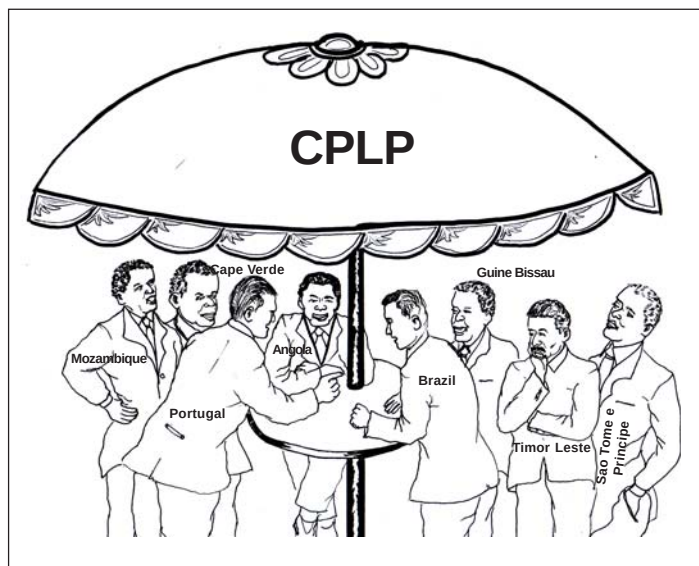
Seperti dilukiskan oleh tabel di bawah, tiga dari empat proyek yang disetujui dalam pertemuan tersebut adalah pembangunan kapasitas, dan satu dalam sektor kesehatan.

Project	Developed by	Budget (Euros)
Pembangunan Kapasitas Bisnis Kecil untuk Wanita	Federasi Asosiasi Pengusaha Wanita CPLP	288.000
Pembangunan Kapasitas (belum didefinisikan)	Badan Kerjasama Brasilia	150.000
Pembangunan Kapasitas untuk 20 pejabat pemerintah Angola, Cape Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Sao Tome, dan Timor Leste dalam hubungan dagang internasional	Kementerian Luar Negeri Brasilia	129.500
Seminar Perawatan Malaria	Institut Kesehatan dan Obat-Obatan Tropis (inisiatif pemerintah Portugal, Angola, dan Brasil)	72.500

Jika proyek-proyek ini dilaksanakan, maka untuk pertama kalinya Timor Leste termasuk dalam proyek yang didanai CPLP. Sejak pemulihan kemerdekaan tahun 2002, Portugal dan Brazil sudah mendanai dan menerapkan beberapa proyek kerja sama di Timor Leste (baca *La'o Hamutuk Bulletin* Vol. 3, No. 6, dan Vol. 4, No. 3-4), tapi semuanya adalah proyek bilateral.

3. Promosi dan Penyebarluasan Bahasa Portugis dan Budaya “Lusophone”

Ini adalah alasan utama pembentukan CPLP. Budaya “lusophone” adalah konsep yang samar, yang sulit untuk orang yang tidak berbahasa Portugis untuk mengerti (bahkan juga untuk orang-orang yang berbahasa Portugis). Pendeknya, kita



bisa mendefinisikan “lusophony” sebagai warisan kolonial Portugis, yang mengidentifikasikan bekas jajahan Portugis, yang sebagian besar masyarakatnya berbahasa Portugis.

Hampir setiap pertemuan CPLP membahas bagaimana cara mempromosikan bahasa Portugis di dalam negara-negara anggota dan dalam dunia internasional. Walaupun Portugis adalah satu dari bahasa resmi negara-negara anggota, bahasa daerah mendominasi lima dari anggota CPLP, seperti Timor Leste.

Proyek utama yang dirancang untuk mempromosikan bahasa Portugis di negara-negara ini adalah Institut Internasional Bahasa Portugis (International Institute of Portuguese Language – IILP) yang berpusat di Cape Verde dan didirikan pada tahun 2002. Institut ini adalah permata CPLP, tapi seperti masyarakat komunitasnya, ia kekurangan dana dan memiliki banyak proyek yang tidak pernah diterapkan. Walaupun institut ini secara resmi sudah berdiri selama tiga tahun, namun ia tidak produktif. Menurut direktornya, IILP hanya bisa bekerja dengan efektif “apabila negara-negara anggota membayar iuran tahunan mereka, yang merupakan sumber anggaran institut.” Beliau mengatakan bahwa 60% dari anggaran ini adalah untuk biaya administrasi dan gaji, dan kecil sekali sisanya untuk proyek-proyek.

Seperti lainnya, sebagian besar proyek-proyek untuk topik ini didanai dan diterapkan secara bilateral oleh Portugal dan Brazil, bekerja sama dengan Camões Institute dan Centers for Brazilian Studies.

Portugal dan Brazil keduanya memusatkan proyek-proyek bantuan mereka di Timor Leste dalam bidang pendidikan, dan “pengenalan kembali” bahasa Portugis. Mereka mengirim orang-orang untuk mengajar bahasa Portugis di sektor pendidikan formal dan non-formal, dan melatih guru-guru di Timor Leste.

Pada bulan April 2005, kantor berita Portugal Lusa menulis bahwa “jumlah penduduk Timor Leste yang dapat berbahasa Portugis meningkat tiga kali sejak Kemerdekaan,” dari 5-10 persen sampai hampir 25 persen. Pernyataan ini hanya sedikit berdasar pada kenyataan. Jumlah penduduk Timor Leste yang berbahasa Portugis, pada kenyataannya, sangat rendah. Mungkin karena alasan inilah waktu upacara ulang tahun surat kabar *Semario* pada bulan Januari 2005 Presiden Xanana Gusmão dan Perdana Menteri Mari Alkatiri menuduh CPLP tidak bertindak sama sekali untuk membantu mempromosikan bahasa Portugis di negara ini.

Kesimpulan

Tidak diragukan bahwa dua (atau lebih) tentunya lebih kuat dari hanya satu, dan akan semakin sulitlah untuk negara-negara kecil dan terisolasi untuk bertahan dalam dunia pada saat ini. Di suatu dunia yang ideal, negara-negara akan bersatu dan membentuk suatu komunitas berdasarkan kepentingan bersama, dukungan timbal-balik dan solidaritas nyata. Di dunia ideal ini akan ada gerakan dan institusi yang dapat merubah keseimbangan kekuatan di dunia dan mencapai tingkat keadilan yang sangat tinggi.

Tapi karena dunia ini jauh dari ideal, negara-negara bergabung untuk alasan-alasan yang sebagian besar sedikit hubungannya dengan solidaritas yang nyata. Dalam globalisasi kapitalis, “komunitas” ini hanya melanjutkan dinamika yang dominan yang bisa dilihat di seluruh dunia; negara-negara kaya memiliki pengaruh yang tidak proporsional di atas negara-negara berpendapatan rendah.

Dan CPLP tidak berbeda. Walaupun tidak seperti organisasi internasional dan multilateral lainnya semua negara-negara anggota memiliki kekuatan voting yang sama – tak peduli berapa banyak uang yang disumbangkan mereka kepada organisasi, jelaslah bahwa Portugal dan Brazil mendominasi CPLP menurut kepentingan dan agenda mereka sendiri. Mereka adalah negara yang paling kaya dan paling berpengaruh di dalam komunitas ini, memberi sumbangan terbesar, mendanai dan menerapkan sebagian besar dari proyek-proyek komunitas ini. Mereka pada dasarnya memimpin komunitas ini.

Untuk kedua negara ini, keuntungan dari komunitas tersebut sangatlah jelas: memperluas pengaruh mereka, mendapatkan vote tanpa syarat untuk kandidat mereka di organisasi internasional, dan menjamin ketersediaan pasar untuk produksi mereka.

Tapi apa keuntungannya untuk negara yang kecil, berpendapatan rendah, dan tidak begitu kuat seperti Timor Leste? Timor Leste tidak memiliki produksi apa-apa untuk diekspor kecuali kopi dan, di masa datang, minyak – yang banyak anggota komunitas lainnya juga mengeksport. Timor Leste memiliki budaya “lusophone” yang sedikit saja dan pengaruhnya di dalam komunitas hanya kecil saja. Mungkin Timor Leste merasa bahwa dia memiliki hutang sejarah, karena CPLP sejak berdirinya mendukung kemerdekaan Timor Leste.

Satu keuntungan adalah bantuan dana. Tetapi CPLP sendiri adalah komunitas yang “miskin”, dengan anggaran kecil sekali untuk “proyek kerja sama”, yang sebagian besar memprioritaskan anggota-anggota dari Afrika, bukan Timor Leste. Sampai sekarang, Timor Leste tidak menerima proyek kerja sama CPLP.

Benar bahwa Timor Leste mendapatkan banyak bantuan bilateral dari Brazil dan Portugal, yang sebetulnya tidak akan ada bila Timor Leste tidak memiliki Portugis sebagai bahasa resmi. Sewaktu meneliti bantuan Brazil untuk Timor Leste, La’o Hamutuk mewawancara duta besar Brazil pada saat itu, Mr. Kiwal de Oliveira, yang mengatakan bahwa jika Timor Leste tidak memilih Portugis sebagai satu dari bahasa resminya, maka kemungkinan besar Brazil tidak akan membuat satu pun proyek kerja sama di negara ini. Maka kita pun tidak akan kaget apabila Portugal berpendapat sama. Karena ini semua adalah bantuan bilateral, maka biasanya akan ada persyaratan.

CPLP sudah dikritik sebagai badan yang tidak efektif yang memiliki kepentingan yang sedikit dalam membela kepentingan anggota-anggotanya yang miskin. Sewaktu mengunjungi Angola pada bulan Mei 2005, sekretaris CPLP mengatakan bahwa masyarakat Angola adalah masyarakat paling maju dalam hal kerja sama politik-diplomatik dan kerja sama antar anggota. Tapi beberapa kepala negara tidak setuju. Tahun lalu, perdana menteri Cape Verde menyatakan bahwa CPLP harus lebih dinamis lagi, terutama dalam masalah benua Afrika dan dalam memperkuat hubungan antar anggota. Pada awal tahun ini, perdana menteri Timor Leste sendiri menunjukkan ketidakpuasannya akan komunitas ini, dan mengatakan pada Lusa bahwa CPLP “belum membuat suatu mekanisme untuk unjuk gigi di arena internasional.”

Suatu komunitas yang enam dari anggotanya adalah negara yang termasuk paling miskin di dunia, yang ribuan penduduknya meninggal setiap tahun karena kelaparan, malaria, dan AIDS, dan kurangnya persediaan air bersih, hanya bisa efektif bila komunitas ini menjadi komunitas yang nyata, berdasarkan solidaritas dan tidak hanya dalam hal kepentingan dua anggotanya yang paling kuat. ❖

Editorial: Memutihkan Wolfowitz

Nominasi dan kemudian penunjukan Paul Wolfowitz sebagai pemimpin Bank Dunia, menurut pengakuan Bank Dunia sendiri, diiringi dengan “reaksi berbeda”. Hal-hal yang positif adalah beberapa orang yang mengatakan bahwa dia akan membawa pengalaman membangun selama tugasnya menjadi duta besar Amerika untuk Indonesia pada tahun 1980-an. Menurut pendapat tersebut, Wolfowitz mendukung pemikiran ekonomi dan keamanan regional yang kokoh selama tugasnya menjadi duta besar, selain memiliki pengalaman pelayanan publik selama 30 tahun. Pendukung Wolfowitz dengan yakin memprediksi bahwa kritik-kritiknya akan mengalami kejutan menyenangkan dari orang yang dianggap sebagai “ahli pikir” administrasi presiden Bush. Kami meragukannya.

Kesangsian kami mengenai presiden Bank Dunia baru ini berpusat pada dua hal yang saling berkaitan. Pertama, dia adalah pendukung kuat dari sistem ekonomi neoliberal “seragam”, yang menerapkan satu sistem ekonomi untuk semua negara-negara tanpa pandang bulu tanpa memperhatikan situasi dan kondisi mereka, yang secara sistematis diterapkan pada negara-negara berkembang dengan hasil yang nyata-nyata buruk. Kedua, dia

sudah memperlihatkan ketidak-sukaannya pada demokrasi dan mekanisme hukum internasional dengan dukungannya untuk militer Indonesia (TNI) dan perang Irak. Mengingat hal itu, penunjukannya di Bank Dunia adalah satu gejala dari masalah struktural demokrasi dan transparansi Bank Dunia yang lebih besar, yang harus dikaji lagi jika memang Bank Dunia ingin mengentaskan kemiskinan di negara-negara yang disebut sedang berkembang.

Wolfowitz menghabiskan masa bertugasnya di Jakarta (1986-89) dengan mendorong isu ekonomi dan keamanan, sementara perhatiannya pada hak asasi manusia dan demokrasi hanya sebatas omongan. Walau dia sekarang merasa bahwa keberhasilannya mendorong reformasi demokratis semasa menjadi duta besar dan di pekerjaan lalunya sebagai asisten Menteri Sekretaris Negara AS untuk Asia Timur dan Pasifik sebagai jerih payahnya sendiri, amat mudah untuk melihat bagaimana hubungan Wolfowitz dan Washington dengan diktator-diktator brutal di daerah itu – Soeharto, Ferdinand Marcos dari Filipina, dan Chun Doo-Hwan dari Korea Selatan – dianggap mendorong dan memelihara diktator-diktator tersebut. Diktator-diktator ini, dengan sikap anti-komunis yang

sesuai dengan agenda perang dingin Amerika, membiarkan ekonomi negara mereka digunakan sebagai kelinci percobaan untuk kebijakan ekonomi saat itu – yang dikenal dengan nama “Konsensus Washington”. Kebijakan ini didukung oleh pemerintah AS, yang kemudian diekspor ke Bank Dunia dan IMF.

Ahli ekonomi dan politik Jeffrey Winters menyebutkan bahwa antara 1986-89, Wolfowitz mengawasi Kantor Pendukung Kebijakan Ekonomi (Economic Policy Support Office – EPSO), yang ada di Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. EPSO, Bank Dunia, dan IMF, adalah pihak yang bertanggung-jawab dalam mendukung perencanaan ekonomi Indonesia yang membawa bencana, seperti deregulasi sektor perbankan. Kebijakan ini membuka pintu untuk pendirian bank-bank swasta dengan sedikit aturan yang dapat mengatur perilaku mereka, serta tanpa mekanisme pemerintah untuk menghalangi mereka. Perekonomian Indonesia dibuat seakan truk tanpa rem sarat dengan deposito masyarakat, yang tanpa kendali melaju menuju jurang krisis ekonomi Asia di tahun 1997-98 ketika sistem perbankan harus diselamatkan. Ini menimbulkan hutang yang sangat besar yang kemudian harus ditanggung oleh rakyat Indonesia.

Resep ekonomi Bank Dunia/IMF untuk Indonesia itu sama saja dengan resep yang digunakan untuk negara berkembang lain; liberalisasi perdagangan, pengurangan pagar tarif, pembukaan pintu investasi asing, dukungan untuk industri berorientasi ekspor, privatisasi, dan deregulasi. Uang dapat mengalir bebas menyeberangi batas-batas nasional, sementara tenaga kerja tidak bisa. Tujuan terutama pendekatan macam ini adalah pertumbuhan ekonomi yang akan, paling tidak dalam teori, mengurangi angka kemiskinan dan jumlah pengangguran, serta – sebagai salah satu efek sampingnya – memperkuat nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan pers dan kebebasan berbicara.

Asumsi yang keterlaluan dari Konsensus ini didasarkan pada teori ilmu ekonomi neoklasik yang menurut mereka tidak bisa disangkal. Sangat sedikit negara yang pada era yang sama dicekoki Konsensus ini dapat bangkit tanpa cacat. Sebagai contoh, pada waktu krisis ekonomi Asia, negara-negara yang mengikuti nasihat Departemen Keuangan AS untuk tidak menerapkan “pengendalian modal” (yang menyebabkan para investor dapat mengalirkan uang mereka keluar dari negara-negara yang terpuruk secara elektronik) menyebabkan ekonomi negara-negara tersebut semakin terpuruk ke dalam krisis. Negara-negara ini, termasuk Indonesia, adalah negara-negara yang mengadopsi Konsensus Washington secara keseluruhan.

Wolfowitz dan TNI

Keterlibatan Wolfowitz dengan Indonesia melebihi tugasnya sebagai duta besar. Sejak Kongres AS melarang pelatihan militer Indonesia tahun 1992, Wolfowitz mendorong diteruskannya ikatan kerja sama militer AS-Indonesia dan dukungan lain untuk rezim Suharto. Setelah dia menjadi deputi Menteri Pertahanan tahun 2001, Wolfowitz memegang kekuasaan, dan administrasi presiden Bush baru-baru ini melanjutkan pelatihan militer Indonesia ini. Tindakan ini bermotif dari peran strategis Indonesia untuk Washington dalam ‘Perang Melawan Terorisme’, walaupun jalan untuk ini sudah dimudahkan oleh jaringan koneksi Wolfowitz dari TNI, yang dibentuk sejak tahun 80an.

Pada kunjungannya ke Jakarta di bulan Januari pasca bencana Tsunami, dia menggunakan momen tersebut untuk berdiri di samping Menteri Pertahanan RI Juwono Sudarsono, untuk kembali mengangkat isu pelatihan militer untuk TNI. Dia mengatakan bahwa pelatihan militer oleh Amerika itu dapat memberikan dampak positif. “Saya yakin bahwa kita sudah

mencegah terjadinya beberapa masalah, karena banyak perwira-perwira Indonesia... pernah ke Amerika Serikat... Saya rasa ini adalah hal yang perlu dibangun kembali.” Pada kesempatan wawancara lain, dia lebih spesifik lagi: “Perwira-perwira yang memiliki kontak nyata dengan Amerika lebih terbuka pandangannya, lebih menerima pengendalian oleh sipil, dan bersifat lebih mendukung demokrasi.”

Dengan mempertimbangkan hal di atas, sangat perlu dilihat suatu contoh kasus perwira yang dilatih Amerika itu, yaitu Mayjen Sjafrie Sjamsuddin, yang menghadiri latihan intelijen khusus di Amerika pada tahun 1977, dan latihan anti-terorisme tahun 1986. Pada tahun 1991, Sjamsuddin adalah kepala intelijen Kopassus dan memiliki peran besar dalam pembantaian Santa Cruz. Pada masa referendum tahun 1999, surat rahasia yang bocor menunjukkan hal ini; bersama dengan rekannya dan komandan umum TNI dan militia di Timor Leste Mayjen Zacky Anwar Makarim, Sjamsuddin merancang kebijakan TNI/milisi untuk meneror rakyat dan menghancurkan infrastruktur. Sebagai contoh betapa TNI masih belum berubah sejak meninggalkan Timor Leste, pada tahun 2002 Sjafrie ditunjuk sebagai kepala juru bicara TNI.

Sjamsoeddin adalah satu saja dari banyak perwira TNI yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang mendapat pelatihan dari Amerika Serikat. Paul Wolfowitz terus menyarankan pelatihan untuk militer yang selalu menolak bertanggungjawab atas tindakannya di masa lampau dan terus melakukan penghancurannya di Aceh, Irian Barat, dan daerah lain di Indonesia. Melihat ini – dan peran barunya sebagai salah satu arsitek penyerangan ilegal dan penjajahan di Irak – Paul Wolfowitz selalu menunjukkan ketidakhormatannya terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional.

Kesimpulan

Penunjukan Paul Wolfowitz sebagai presiden adalah mengejek konsep dasar Bank Dunia sebagai institusi yang berdedikasi untuk mengentaskan kemiskinan dan penciptaan dunia yang adil dan damai. Seseorang yang terus mendukung hubungan dengan salah satu rezim paling otoriter di dunia dan yang mendukung militerisme Amerika untuk menguntungkan Amerika secara sepihak dan tidak proporsional sudah barang tentu bukanlah teman yang baik untuk mayoritas masyarakat dunia.

Penunjukan Wolfowitz menunjukkan bahwa Bank Dunia sangat membutuhkan reformasi. Dia adalah institusi yang sangat tidak demokratis: dijalankan menurut bagian suara yang berdasarkan jumlah uang sumbangan negara-negara anggotanya, memihak pada negara-negara kaya – terutama Amerika Serikat, yang selalu menunjuk dan mengangkat presidennya. Melihat bahwa Bank Dunia selalu memiliki presiden dari Amerika, yang menunjukkan keberpihakan geopolitis dan kepentingan ekonomi Bank Dunia dengan Amerika Serikat. (James Wolfensohn yang lahir di Australia mendapat kewarganegaraan Amerika sebelum menjadi presiden Bank Dunia)

Bank Dunia sangat perlu menghadapi isu-isu ini, dan melakukan pengamatan independen terhadap kebijakan ekonominya yang sudah menyumbang ketidakadilan ekonomi yang parah di seluruh dunia. Persis seperti kasus Robert McNamara (yang juga datang langsung dari Departemen Pertahanan AS dan perang yang tidak populer – perang Vietnam – untuk menjadi pemimpin Bank Dunia lebih dari satu dekade), masa lalu Paul Wolfowitz menunjukkan bahwa kepemimpinannya nanti akan melanjutkan dan meningkatkan ketidakadilan ekonomi global. ❖

COE: Kurangnya Niat Politik Akan Menghalangi Keadilan Bagi Timor Leste

Pada akhir bulan Mei 2005, Commission of Experts (COE) menyampaikan laporannya yang sudah ditunggu-tunggu untuk Sekretaris Jenderal PBB. Pada akhir bulan Juli, PBB menerbitkan laporan ini untuk umum, setelah dipresentasikan pada Dewan Keamanan. Laporan ini dapat dilihat di internet, di: <http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/426/17/pdf/N0542617.pdf?OpenElement>

Pada bulan Februari 2005, Sekretaris Jenderal Kofi Annan menunjuk komisi ini untuk mengkaji kecukupan proses yudisial di Indonesia dan Timor Leste dalam hal penuntutan orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat pada tahun 1999. Ini mengikuti sejumlah resolusi Dewan Keamanan yang memperkuat keputusan bahwa pelaku pelanggaran yang mengerok rakyat Timor Leste harus dituntut dalam pengadilan. Anggota komisi ini adalah seorang hakim terkenal dari Indonesia, seorang profesor hukum internasional dari Jepang, dan seorang pemimpin HAM dari Fiji, semua dengan pengalaman dalam hukum dan HAM internasional yang panjang.

Di Timor Leste, kajian COE termasuk Unit Pelanggaran Berat (Serious Crimes Unit – SCU), Panel Khusus Pelanggaran Berat (Special panels for Serious Crimes – SPSC), dan Unit Pembelaan (Defence Lawyers Unit). Walaupun pemerintah Indonesia pada awalnya menolak bekerja sama dalam pengkajian ini, pada pertengahan Mei Jakarta memperbolehkan para anggota komisi memasuki wilayah Indonesia. Komisi ini juga diminta untuk mengkaji ruang lingkup untuk Komisi Kebenaran Dan Persahabatan¹ (Commission of Truth and Friendship – CTF) dan untuk mencari jalan tempat pengkajian tersebut dapat digunakan dan membuat rekomendasi yang tepat.

Sebagai hasil penyelidikan mereka, komisi menyimpulkan bahwa keadilan untuk perkara kejahatan tahun 1999 belum didapat oleh masyarakat Timor Leste. Khususnya, proses-proses ini gagal menyeret mereka yang paling bertanggung jawab untuk pelanggaran HAM berat ke pengadilan. Sebab utama kegagalan ini, menurut laporan tersebut, adalah kurangnya niat politik – khususnya di Indonesia. Pada pertengahan Juni, presiden dan perdana menteri Timor Leste menyurati Sekretaris Jenderal PBB, sebagai penolakan atas rekomendasi-rekomendasi Komisi ini untuk menciptakan mahkamah internasional, dan mereka mendorong komisi bilateral Kebenaran dan Persahabatan mereka.

Keadilan dan Niat Politik di Indonesia

Komisi ini mendapatkan bahwa, walaupun ada halangan sumber daya, waktu dan mandat, KPP HAM Indonesia dikerjakan dengan sikap menyeluruh dan dapat dipercaya, seusia dengan standar internasional.

Meski demikian, komisi ini mendapatkan bahwa proses hukum selanjutnya di Indonesia, termasuk penyelidikan kantor Kejaksaan Agung dan Pengadilan Ad Hoc, adalah nyata-nyata tidak mencukupi dalam hal penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan, dan telah gagal memberikan keadilan. Atmosfir dan konteks proses pengadilan memperlihatkan kekurangan niat-politis di Indonesia untuk menuntut para terdakwa secara serius dan dapat dipercaya. Selain itu, laporan itu mengatakan bahwa banyak aspek dari proses

hukum ad hoc menunjukkan kurangnya rasa hormat untuk atau kepatuhan kepada standar internasional yang relevan.

Anggota komisi juga mencatat bahwa kegagalan pencapaian keadilan di Timor Leste terutama disebabkan kurangnya kooperasi pemerintah Indonesia dan proses pelanggaran kriminal berat Timor Leste dalam hal penyidikan dan akses ke para terdakwa.

Lebih penting lagi, komisi mendapatkan bukti yang cukup untuk menangkap dan menuntut sejumlah pejabat tingkat tinggi (seperti Jenderal Purnawirawan Wiranto dan lainnya, yang disebutkan bersama dalam tuntutan Wiranto) dan menyatakan keprihatinannya bahwa pelaku tingkat tinggi seperti mereka masih belum bisa diseret ke meja hijau di Timor Leste.

Tetapi, komisi mencatat perubahan progresif di Indonesia sejak Pengadilan Ad Hoc terdahulu dan menyatakan pujian kepada reformasi hukum di Indonesia baru-baru ini untuk memperkuat perangkat hukum dan kehormatan untuk hak asasi manusia, khususnya pada hal pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudisial.

Keadilan dan Niat Politik di Timor Leste

Komisi menemukan bahwa proses pengadilan pelanggaran berat di Timor Leste mencapai sedikit keadilan untuk para korban dan keluarganya dan pertanggungjawaban untuk beberapa aksi kekerasan pada tahun 1999. Sementara SCU dan SPSC berfungsi buruk pada beberapa pertama, proses pengadilan pelanggaran berat membaik dalam waktu itu dan sekarang (atau pada waktu pencatatan) umumnya memuaskan dan sesuai dengan standar internasional. Khususnya, komisi mendapatkan bahwa proses pengadilan pelanggaran berat memberi sumbangan besar untuk memperkuat kehormatan hukum di Timor Leste dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses keadilan dan rekonsiliasi.

Mengingat itu, komisi mencatat bahwa kegagalan membawa para tersangka penyulut kekerasan ke pengadilan adalah dikarenakan tidak adanya persetujuan ekstradisi antara Timor Leste dan Indonesia. Khususnya, hampir semua yang dijerat dan dijatuhi hukuman oleh SPSC hanya orang-orang Timor Leste sendiri dengan tanggung jawab komando yang relatif rendah. Pada saat bersamaan, komisi mencatat ketidakcukupan sumber daya untuk mencapai syarat minimal untuk mandat-mandat yang bersangkutan – yang dibawah UNTAET akhirnya jadi memperpendek kapasitas dan mandatnya menjadi hanya sampai 1999, yang disebut untuk tujuan praktis.

Komisi ini mengkritik usaha presiden Xanana Gusmao yang menghentikan diteruskannya tuntutan Wiranto dan lainnya ke Interpol dan menunjukkan hal ini sebagai contoh bagaimana kantor Kejaksaan Umum di Timor Leste kelihatan seperti dibawah tekanan dan pengaruh politik yang tidak baik. Dalam hal ini, proses hukum tidak sepenuhnya menuruti standar hukum nasional maupun internasional, karena kantor Kejaksaan Umum tidak berfungsi secara independen dari pemerintah. Pada keseluruhannya, Komisi menyimpulkan bahwa pada saat ini ada ketiadaan niat politik dan dukungan pemerintah di Timor Leste untuk diteruskannya proses hukum pelanggaran berat. Melihat berakhirnya proses hukum

pelanggaran berat di Timor Leste pada tanggal 20 Mei, Komisi menyatakan keprihatinannya bahwa sifat proses yang belum selesai ini bisa merusak proses pengadilan kriminal di negeri ini, dan menciptakan adanya orang-orang di atas hukum.

Komisi ini membuat catatan khusus bahwa arsip-arsip SCU dan SPSC haruslah dijaga dengan sangat baik.

Rekomendasi Kunci Untuk Mencapai Keadilan

Memandang kajian mereka, Komisi menyarankan beberapa pilihan kepada Dewan Keamanan untuk memastikan pencapaian keadilan.

Pilihan pertama mendorong pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk membentuk proses hukum yang dapat dipercaya di negeri mereka masing-masing, untuk menyelidiki pelanggaran berat ini dengan bantuan internasional seperlunya.

Di Indonesia, ini akan mencakup suatu kajian menyeluruh, perluasan mandat hukum yang mencakup Timor Leste pada tahun 1999, diajukan kembalinya pengadilan kasus-kasus yang lampau, serta perangkat untuk memastikan integritas hukum yang transparan. Ini secara khusus meliputi penyelidikan kasus *Wiranto dan lain-lain* menuju penuntutan. Di Timor Leste, ini akan mencakup dukungan kelanjutan proses hukum pelanggaran berat sampai pekerjaannya selesai, dipisahkannya kantor Kejaksaan Umum dari pengaruh politik, dan proses surat penangkapan yang pada waktunya. Komisi mengatakan bahwa persetujuan kedua negara untuk kerja sama hukum sangatlah penting, termasuk akses kepada para tersangka di Indonesia.

Disarankan agar komitmen pemerintah kedua negara ini dapat segera terlihat dalam jangka waktu enam bulan dari tanggal yang ditetapkan Sekretaris Jenderal PBB.

Pilihan kedua: jika usulan di atas tidak diambil oleh Dewan Keamanan atau diterima oleh pemerintah kedua negara, Komisi sangat menyarankan PBB untuk membentuk mekanisme alternatif untuk menyelesaikan proses hukum yang dapat dipercaya. Komisi menyarankan mekanisme ini untuk mendukung pemerintah Timor Leste memegang kedaulatannya dalam proses hukum dan mendorong pembangunan kapasitas hukum dengan bantuan internasional.

Pilihan ketiga: jika tidak satu pun dari kedua saran di atas diambil, Komisi menyarankan Dewan Keamanan untuk membentuk mahkamah internasional di negara selain Indonesia atau Timor Leste.

Pilihan keempat: mendalami kemungkinan digunakannya Pengadilan Internasional sebagai alat untuk menyelidiki dan menuntut pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Leste.

Pilihan tambahan: Komisi melihat bahwa negara-negara anggota PBB dapat, menurut hukum negaranya masing-masing, meminjamkan yurisdiksi mereka kepada masyarakat internasional kapanpun untuk mendorong penyelidikan dan penuntutan orang-orang yang bertanggungjawab dalam pelanggaran HAM berat di Timor Leste pada tahun 1999.

Kesimpulan Komisi

Komisi ini mengatakan bahwa walaupun ruang lingkup pengkajian mereka hanya dalam hal proses hukum kasus tahun 1999, Komisi ini tetaplah melihat latar belakang terjadinya situasi tahun 1999 ini, khususnya skala dan keseriusan kekejaman yang dilakukan sebelum tahun 1999, selama 24 tahun penjajahan Indonesia atas Timor Leste.

Aksi Damai Menyambut Kedatangan Komisi Ahli

Pada tanggal 5 April 2004 para aktivis pembela HAM dan Keadilan beserta pelajar dan mahasiswa menggelar aksi bisu di Bandara Internasional Nicolau Lobato, Dili guna menyambut kedatangan komisi Ahli yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal PBB yang terdiri dari 3 orang yaitu: Yozo Yokota (Jepang), Pracullachandra Bhagawati (India) dan Shaista Shaneem (Fiji). Mandat yang diemban oleh Komisi Ahli tersebut adalah untuk mengevaluasi pengadilan Ham Ad hoc Jakarta dan Serious Crime Unit (SCU) di Timor Leste. Dalam aksi bisu tersebut bunyi spanduk yang dibawa para demonstran yaitu: *"No Impunity, No Amnesty, Justice For Victim "* (Tidak ada kekebalan hukum, tidak ada amnesti, Keadilan untuk para korban). Partisipan aksi tersebut berjumlah sekitar 100 orang.

Di hari berikutnya para NGO yang tergabung dalam Aliansi Nasional untuk Pengadilan Internasional, bertemu langsung dengan komisi Ahli tersebut di Aula Obrigado Barak. Pertemuan ini diorganisir oleh Human Rights Unit UNMISSET guna untuk mendiskusikan tentang peradilan yang selama ini dijalankan oleh dua badan peradilan seperti Spesial Panel-SCU dan Pengadilan Ham Ad Hoc di Indonesia, apakah telah berjalan sesuai standar Internasional dan apakah telah melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya untuk memberikan keadilan bagi para korban. Dalam pertemuan tersebut, para komisi ahli melontarkan isu dari desas desus bahwa masyarakat Timor Leste semua memilih rekonsiliasi ketimbang Keadilan.

Selain itu, komisi ahli tersebut juga bertemu langsung dengan para korban dan keluarga korban dari 13 Distrik yang diorganisir oleh Human Rights Unit Unmiset untuk mendengarkan langsung apa yang mereka inginkan.

Hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut dan informasi yang mereka kutip dari berbagai NGO dan keluarga korban, adalah bagian dari informasi yang akan dijadikan landasan untuk Laporan Komisi Ahli kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan keamanan.

Walaupun mengakui pentingnya pemberian maaf, Komisi tetap bersikeras bahwa pemberian maaf harus diiringi keadilan, dan mengakhiri laporan mereka dengan suara keras yang memanggil masyarakat internasional untuk mendukung keadilan dan proses hukum untuk rakyat Timor Leste, yang berkepentingan juga untuk masyarakat internasional.

"Tidak ada pelanggaran hak asasi, tidak ada penjajahan harga diri manusia, dan tidak ada aksi yang menyakiti dan menyengsarakan manusia lain yang boleh lepas dari jerat hukuman. Walaupun diakui bahwa pemberian maaf sangatlah baik dan mungkin dibenarkan untuk kasus-kasus perorangan, pemberian maaf tanpa ada keadilan untuk kesengsaraan dan penindasan yang tidak terhitung lagi akan menjadi suatu kelemahan, bukan kekuatan.

Komisi ingin menekankan kekejaman luar biasa yang dilakukan, dan setelah hal itu berlalu masih menjadi tanggungan rakyat Timor Leste. Situasi ini tidak hanya mengharuskan simpati dan pengganti, tapi juga keadilan." ❖

Editorial: Kebenaran dan Persahabatan (sambungan dari halaman 16)

diinstruksikan untuk menekankan pertanggungjawaban institusional. Hal ini tidak hanya akan memudahkan para penguasa untuk menghindari pertanggungjawaban moral, tetapi tindakan ini kelihatan sengaja diarahkan pada pencegahan pembuatan proses hukum independen di masa datang, seperti sebuah mahkamah internasional.

Selain dari sengaja menutupi proses keadilan di pengadilan, CTF sepertinya tidak akan melayani kebenaran dengan baik. Ini karena penyelidikannya terbatas, CTF banyak dihambat – kadang dengan sengaja, kadang juga karena pengelolaan yang tidak baik, ketidakmampuan, dan keterbatasan sumber daya manusia. Lebih penting lagi, pemerintah Indonesia menolak bekerja sama dengan usaha Timor Leste dan internasional untuk menyelidiki dan menyeret orang-orang yang dituduh melanggar HAM di tahun 1999 ke pengadilan, melalui Panel Khusus Kejahatan Berat, dengan hasil 76% dari orang-orang yang dituntut oleh Unit Pelanggaran Berat menikmati kekebalannya di Indonesia. Dalam hal pengadilan ad-hoc di Jakarta, tidak satupun orang Indonesia mendapat hukuman – sebagai hasil dari proses yang tidak tulus dan sangat tidak memadai. Selain itu, Jakarta tidak menyediakan dokumentasi apa pun untuk CAVR, walaupun sudah diminta berkali-kali. Untuk itu, hanya sedikit bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia akan bekerja dengan CTF dengan sikap yang membawa hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Walaupun CTF tidak diberi kekuasaan untuk menyeret para pelaku ke pengadilan, badan ini diinstruksikan untuk “memberi rekomendasi tindakan rehabilitasi untuk mereka yang keliru dituduh melanggar HAM”, yang ditakutkan akan membuat langkah-langkah yang dilakukan KPP-HAM atau Unit Pelanggaran Berat untuk menuntut *Wiranto dan lain-lain* dapat ditolak.

Kinerja komisi ini juga rentan terhadap campur tangan pemerintah. Menteri luar negeri kedua negara memiliki peran pengawasan dan penasehat langsung, yang kemudian memunculkan pertanyaan mengenai integritas temuannya. Dalam konteks ini, bisa disimpulkan bahwa tujuan sebenarnya komisi ini adalah untuk mencapai kebenaran konsensus, bukan kebenaran konklusif (meyakinkan), karena kebenaran tidak pernah dilayani dengan baik oleh manajemen politik.

Yang terakhir, CTF tidak melakukan tindakan untuk menjembatani jurang pertanggungjawaban mengenai kejahatan berat yang dilakukan pada tahun 1975 dan 1998, periode yang meliputi penyerangan Indonesia yang brutal yang kemudian berujung pada seluruh waktu penjajahan. Banyak peristiwa dalam periode ini yang jelas merupakan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang, tetapi CTF yang sekarang diciptakan akan mengabaikan semuanya. Ini akan menjadikan suatu legitimasi agresi awal Indonesia dan pendudukannya atas Timor Leste – yang keduanya adalah nyata-nyata pelanggaran hukum internasional.

Legitimasi yang Dipertanyakan

Saat ini bukti terbesar bahwa sebagian terbesar masyarakat Timor Leste, terutama para korban, menuntut pertanggungjawaban dan keadilan di pengadilan hukum resmi untuk pelanggaran HAM berat. Tetapi, pemerintah Timor Leste tidak berkonsultasi dengan masyarakat dalam pembentukan CTF dan mengabaikan hak-hak mereka akan keadilan, dan

kelihatannya mereka tidak akan dikonsultasikan dahulu mengenai rekomendasi untuk rekonsiliasi.

Program Pengawasan Sistem Peradilan (Judicial System Monitoring Programme – JSMP) yang berpusat di Dili sudah mempertanyakan legitimasi demokratis CTF, yang berpendapat bahwa badan ini tidak konstitusional karena mengabaikan pengesahan dari parlemen dan akan memberikan amnesti tanpa mengikuti proses hukum yang benar. Lebih dari itu, Aliansi Nasional Mahkamah Internasional (National Alliance for International Tribunal) di Timor Leste, seperti halnya LSM HAM di Indonesia, sudah menyatakan bahwa CTF tidak pantas didirikan karena badan ini meremehkan proses hukum yang sedang dijalankan dan bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1272, yang mengharuskan para pelaku untuk diseret ke pengadilan.

Keefektifan yang Dipertanyakan

Rekonsiliasi antara kedua pemerintah ini bukanlah pengganti bagi rekonsiliasi antara masyarakat kedua negara. Ini berdasarkan alasan bahwa suatu prasyarat rekonsiliasi harus melibatkan pengidentifikasian kedua pihak yang harus direkonsiliasikan dan memastikan penerimaan dan partisipasi mereka yang sesungguhnya. CTF kemungkinan besar tidak akan mendapatkan keterlibatan sungguh-sungguh dari para pelaku dan para korban dari masyarakat kedua negara. Tanpa partisipasi mereka, versi rekonsiliasi CTF hanyalah sebuah kebohongan belaka.

Untuk alasan ini, Aliansi Nasional Timor Leste dan LSM-LSM Indonesia berpendapat bahwa CTF tidak akan dapat menyiapkan pondasi yang kokoh untuk sebuah rekonsiliasi yang nyata dan tahan lama atau memperkuat demokrasi dan prinsip HAM di kedua negara. CTF tidak dapat menciptakan kesimpulan sungguh-sungguh atau rasa saling hormat melalui jalan pintas politik yang mencoba mengabaikan rakyat untuk membuat “kebenaran konsensus”. Akhir-akhir ini terlalu banyak kegagalan besar dari usaha-usaha pemerintah untuk menutupi kebenaran sejarah, untuk mempercayai bahwa stabilitas politik dan hormat untuk HAM dapat diperoleh tanpa kebenaran dan keadilan yang nyata.

Kesimpulan

Kekurangan kritis dari CTF memperkuat pandangan La'o Hamutuk bahwa suatu mahkamah internasional yang independen sangat dibutuhkan. Aksi kekerasan pada tahun 1999 – ditambah dengan pada tahun-tahun 1975 dan 1998 – jelas merupakan suatu Kejahatan Perang dan Kejahatan Kemanusiaan. Melihat demikian, seluruh masyarakat internasional harus bertanggungjawab atas penyelidikan, penuntutan, dan ganti rugi. Walau mungkin kita dapat mengerti tekanan terhadap pemerintah Timor Leste yang mendorongnya untuk melakukan pendekatan pertanggungjawaban pragmatis (dan kaku), alasan sama tidak berlaku untuk masyarakat internasional. Ujian sesungguhnya untuk komitmen internasional terhadap HAM adalah apakah keadilan dicari dengan sungguh-sungguh untuk semua, seperti rakyat Timor Leste, yang lemah di panggung dunia. Kegagalan melakukan hal ini dalam usaha mengadili kejahatan yang dilakukan di Timor Leste, hanya akan menjatuhkan kredibilitas PBB dan menghilangkan kehormatan masyarakat internasional untuk masalah mekanisme hukum dan hak asasi manusia internasional. ❖

Editorial: Komisi Kebenaran dan Persahabatan Tidak Akan Menghasilkan Keduanya

Pada bulan Maret 2005, pemerintah Indonesia dan Timor Leste menandatangani persetujuan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (Commission of Truth and Friendship – CTF atau CVA) bersama, dalam menangani masalah pelanggaran HAM di Timor Leste tahun 1999. Tujuan utama dari badan ini adalah untuk “mendapatkan kebenaran yang meyakinkan” mengenai peristiwa di atas, dan mempromosikan rekonsiliasi dan persahabatan di dalam dan di antara kedua negara. Mandat CTF adalah untuk mengkaji dan meneliti laporan-laporan yang dikumpulkan oleh Komisi Nasional Penyelidikan Pelanggaran HAM di Timor Leste (KPP-HAM) di Indonesia, Pengadilan Ad-hoc HAM untuk Timor Leste di Jakarta, Panel Khusus PBB-Timor Leste Untuk Kejahatan Berat, dan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Leste (CAVR). Komisi ini akan menghasilkan laporan terbuka yang memuat suatu “arsip sejarah bersama” dan merekomendasikan tindakan-tindakan untuk mempromosikan rekonsiliasi dan persahabatan. CTF bukanlah proses pengadilan, dan dilarang untuk mengarah atau mengusulkan pada proses pengadilan lebih jauh kepada para pelaku.

Ruang Lingkup CTF bisa dilihat di: <http://www.deplu.go.id/2005/detail.php?doc=96e52248b11d7ca67014e8008f2dead>. Website Departemen Luar Negeri Indonesia juga memiliki Ruang Lingkup ini dalam Bahasa Indonesia, tetapi dihapus pada bulan Juli.

Komisi ini memulai kerjanya pada awal Agustus. Kesepuluh anggotanya yang ditunjuk oleh Timor Leste (Jacinto Alves, Dionisio Babo, Aniceto Guterres, Felicidade Guterres, dan Cirilio Varadakes) dan Indonesia (Achmad Ali, Wisber Loeis, Benjamin Mangkudilaga, Msgr. Petrus Turang dan Agus Widjojo).

Apa Biaya Komisi Kebenaran dan Persahabatan?

La'o Hamutuk mendukung prinsip untuk mempromosikan rekonsiliasi dan persahabatan antara Indonesia dan Timor Leste. Namun rekonsiliasi dan persahabatan itu harus didasarkan tidak hanya pada penegakkan kebenaran mengenai kejahatan HAM di Timor Leste, tetapi juga pada proses pengadilan untuk kejahatan tersebut. Komisi Kebenaran dan Persahabatan gagal total dalam kedua hal ini. Untuk alasan inilah, kami memiliki keprihatinan serius mengenai tujuan, kredibilitas, legitimasi, dan keefektifan CTF dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dengan memberikan kekebalan hukum pada para pelaku dan mengingkari akses para korban untuk mendapatkan keadilan dan dengan membatasi penyelidikannya sampai tahun 1999 saja, CTF akan meminta harga yang mahal dalam hal kebenaran, pertanggungjawaban, dan hormat pada hak asasi manusia dan hukum internasional.

Kedua pemerintahan mengusulkan CTF pada akhir 2004 sebagai upaya untuk meminta agar PBB tidak menunjuk Komisi Ahli (COE). Sekretaris Jenderal Kofi Annan menolak tekanan ini, dan tujuan politik CTF pada saat ini tidak jelas. Dalam laporannya, Komisi Ahli mengkritik keras Ruang Lingkup CTF, dan mengatakan bahwa badan ini “bertolak belakang dengan standar internasional untuk menolak

kekebalan hukum untuk pelaku pelanggaran berat” dan tidak memiliki “mekanisme untuk mendorong saksi agar bersaksi dengan jujur.” Komisi Ahli juga melihat bahwa “dukungan kokoh pemerintah (Timor Leste) untuk CTF tidak mencerminkan dukungan masyarakat luas di Timor Leste.”

Pengingkaran Keadilan dan Kebenaran

Pemerintah Timor Leste dan Indonesia menjelaskan bahwa fungsi CTF adalah untuk menutup buku akan kejahatan-kejahatan pada tahun 1999. Tetapi tidak seperti CAVR dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi lainnya, CTF menghilangkan proses hukum. CTF akan menawarkan amnesti kepada para pelaku yang bekerja sama dengannya, dan lingkup kerjanya secara jelas melarang proses komisi ini untuk menuju pada penuntutan atau merekomendasikan badan pengadilan baru. Bukannya menentukan peran serta perorangan para pelaku dalam kejahatan-kejahatan ini, CTF

(bersambung ke hal 15)

Apakah La'o Hamutuk itu?

La'o Hamutuk (Berjalan Bersama) adalah sebuah organisasi Timor Lorosa'e yang memantau, menganalisis, dan melaporkan tentang kegiatan-kegiatan institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor Lorosa'e dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial negeri ini. *La'o Hamutuk* berkeyakinan bahwa rakyat Timor Lorosa'e harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses ini dan bahwa proses ini harus demokratis dan transparan. *La'o Hamutuk* adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi rakyat Timor Lorosa'e yang efektif. Selain itu, *La'o Hamutuk* bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara masyarakat internasional dengan masyarakat Timor Lorosa'e. Staf *La'o Hamutuk* baik itu staf Timor Lorosa'e maupun internasional mempunyai tanggungjawab yang sama dan memperoleh gaji. Terakhir, *La'o Hamutuk* merupakan pusat informasi, yang menyediakan berbagai bahan bacaan tentang model-model, pengalaman-pengalaman, dan praktek-praktek pembangunan, serta memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor Lorosa'e dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan model-model pembangunan alternatif.

La'o Hamutuk mempersilakan kepada mereka yang ingin menyalin kembali buletin atau foto yang ada dalam buletin dengan gratis. Buletin dan foto yang disalin harus tetap mencantumkan nama *La'o Hamutuk* sebagai sumber utamanya.

Dalam semangat mengembangkan transparansi, La'o Hamutuk mengharapkan anda menghubungi kami jika mempunyai dokumen dan atau informasi yang harus mendapatkan perhatian rakyat Timor Lorosa'e serta masyarakat internasional.